



SKRIPSI

**ANALISIS PERAN ANADOLU AJANSI DALAM MENGGLOBALKAN NARASI
TURKI DI RANAH POLITIK INTERNASIONAL PADA TAHUN 2015-2019**

Diajukan oleh

Muhammad Salman Alfarisi

NIM: 17323011

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2020

HALAMAN PENGESAHAN

1. Nama Mahasiswa : Muhammad Salman Alfarisi
2. NIM : 17323011
3. Judul Tugas Akhir : Analisis Peran Anadolu Ajansi dalam Mengglobalkan Narasi Turki di Ranah Politik Internasional pada Tahun 2015-2019

Yogyakarta, 9 Januari 2020

Mahasiswa

(Muhammad Salman Alfarisi)

NIM. 17323011

Mengetahui

Ketua Program Studi

(Hangga Fathana S.IP., B.Int.St., M.A.)

NIK:

LEMBAR KEASLIAN TUGAS AKHIR

Dengan ini, saya:

Nama : M. Salman Alfarisi

NIM : 17323011

Prodi / Fakultas : Hub. Internasional/FPSB

Judul Tugas Akhir : Analisis Peran Anadolu Agency dalam Mengglobalkan Narasi Turki di Ranah Politik Internasional pada Tahun 2015-2019

Menyatakan bahwa Tugas Akhir dengan judul di atas adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia bertanggung jawab dan menerima sanksi yang ditetapkan oleh Program Studi Hubungan Internasional. Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 10 September 2021

Penulis,

M. Salman Alfarisi

(17323011)

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Turki menjadi negara yang seolah kembali ke masa keemasannya setelah beberapa tahun gerakan politiknya yang kurang masif. Sejalan dengan hal tersebut, Turki juga mempunyai senjata untuk menguatkan narasinya terhadap publik dunia melalui medianya, yaitu Anadolu Ajansi (AA). Media berita tersebut pada dasarnya memuat isu dari berbagai bidang seperti halnya media berita lain. Akan tetapi AA dalam hal ini seolah sangat proaktif terhadap pemerintahan Turki. Khususnya dimasa pemerintahan Recep Tayyip Erdogan sebagai Presidennya. Sesuai dengan awal kemunculannya, AA memang menjadi penyambung informasi (*broadcaster*) mengenai undang-undang pertama Majelis yang mendirikan republik Turki pada tahun 1920 ketika pemerintahan Presiden Turki pertama, Mustafa Kemal Attaturk. AA telah mengalami pasang surut hingga saat ini dimana media berita tersebut bisa dikatakan menjadi salah satu *broadcaster* paling vokal dalam menggaungkan narasi Turki (Anadolu Agency, n.d.).

Sejak Erdogan terpilih menjadi Presiden Turki ke-12, AA telah menjadi salah satu proyek besarnya yang bernama "*The New Turkey*", sebuah konsep besar yang diusung Erdogan dan medianya dengan berfokus pada jejaring sosial yang dibentuk secara online di dalam kantor berita milik negara, yaitu Anadolu Ajansi (Irak, 2018). Pembaruan strategi tersebut sangat lazim, dimana saat ini banyak sekali negara-negara yang menganut sistem demokrasi liberal berlomba-lomba menggunakan, atau bahkan

menciptakan medianya sendiri untuk menyebarluaskan narasinya. Membentuk *framing* untuk mempengaruhi struktur berpikir masyarakat internasional supaya mengetahui permasalahan utama apa yang akan diangkat oleh media atau negara terkait. Jika menilik prinsip *trias politica*, terdapat tiga elemen yang menjadi pilar utama demokrasi. Pertama eksekutif, kedua yudikatif, dan ketiga legislatif (Yulistyowati, 2016). Di masa kini, seiring dengan berkembang pesatnya laju media, baik itu media berita ataupun media sosial, menciptakan pilar baru dalam demokrasi. Media kini dianggap sebagai pilar demokrasi terbaru sebab daya *influence*-nya terhadap masyarakat yang sangat luas, dan sangat mampu mempengaruhi struktur pemikiran masyarakat melalui *framing*-nya.

Setiap media tentunya memiliki kecondongannya masing-masing. Termasuk juga AA yang sangat pro dengan pemerintahan Erdogan yang mana berasal dari partai konservatif AKP. Dalam eksistensinya di dunia media global, AA telah menjadi spesialis dalam pemberitaannya yang sarat akan kepentingan pemerintahan Erdogan. Termasuk dalam hal ini isu mengenai Islamophobia (Irak, 2016). Dalam masanya menjabat sebagai presiden, Erdogan kerap kali menyuarakan keprihatinan tentang Islamophobia di dunia, khususnya Eropa. Perkembangannya yang pasang surut mendorong Turki lebih vokal dalam menggaungkan narasi mengenai Islamophobia, di samping karena Turki merupakan negara mayoritas penduduk beragama Islam (Latief, 2020). Selain isu mengenai Islamophobia, AA secara spesifik kerap kali mengangkat isu konflik Kashmir dalam pemberitaannya. Hal tersebut sejalan dengan upaya Erdogan untuk mengangkat isu konflik Kashmir dalam PBB. Upaya tersebut juga menuai pujian khususnya dari PM Pakistan Imran Khan yang mengapresiasi upaya Turki dalam menyelesaikan konflik

tersebut. Selain dua isu tersebut, tentunya AA juga menjadi media berita yang konsisten mengadvokasi isu-isu dalam negeri dan mengangkatnya ke ranah media global (Rufinaldo, 2019).

Berkembang pesatnya AA sejak dijadikan media dalam menyebarluaskan narasi Turki membuat posisinya semakin strategis. Selain karena berkembangnya industri media secara global, ada faktor lain yang menjadikan AA semakin menunjukkan eksistensinya, yaitu manuver politik Erdogan. Tidak bisa dipungkiri bahwa pergerakan politik Erdogan sangat berani baik didalam maupun luar negeri. Dengan Turki sebagai negara yang Sebagian wilayahnya masuk dalam teritori Eropa, menjadikannya kerap kali bersitegang dengan negara anggota Uni Eropa. Pasalnya, walaupun sebagian wilayahnya termasuk dalam wilayah geografi Eropa, akan tetapi secara keanggotaan Turki tidak masuk dalam anggota Uni Eropa (Ikhsan, 2019). Hal tersebut memungkinkan adanya beberapa pergesekan. Sepanjang tahun 2020, terdapat beberapa kali konflik yang terjadi. Misalnya sengketa migas di laut lepas Mediterania Timur yang wilayahnya diperebutkan oleh Turki dan Yunani. Sebelumnya, Turki dan Yunani juga terlibat dalam konflik atas manuver kontroversial Erdogan yang menjadikan Museum Hagia Sophia sebagai masjid. Tentunya, berkaitan dengan dua konflik tersebut peranan AA sangat strategis dalam membuat *framing media* (Press, 2020).

Berangkat dari dua konflik diatas, sangat penting bagi AA dalam membuat *framing* dan mengkonstruksi pikiran pembaca. Dalam melakukan *framing*-nya, AA secara terang-terangan menggunakan narasi yang cukup tajam dalam menyorot lawan politik Turki. Dalam kasus sengketa di Mediterania Timur, AA menggunakan narasi "Yunani

Berbohong Soal Inisiatif NATO untuk Masalah Mediterania Timur” dalam judul pembukanya. Jika ditelisik lebih lanjut, dalam pemberitaan tersebut terlihat bahwasanya AA menginginkan kepada pembaca tahu bahwa Yunani telah tidak sungguh-sungguh dalam menyelesaikan konflik Mediterania Timur melalui dialog. Lebih lanjut, dalam pemberitaannya tersebut menitikberatkan pada pernyataan langsung dari Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu dan tidak memberi kesempatan Yunani untuk melempar respon atas pernyataan Cavusoglu tersebut. Secara terpisah, redaksi dari kanal berita lain, misalnya CNN Indonesia, menyatakan bahwasanya Yunani bersedia melakukan dialog untuk menyelesaikan sengketa tersebut, dengan NATO sebagai mediatornya (Azzam, 2020a).

Konflik tersebut nyatanya mengakibatkan pergesekan yang terjadi secara beruntun. Yunani bahkan siap jika terjadi perang terbuka melawan Turki. Yunani juga telah menyiapkan jet tempur Dassault Rafale dari Prancis untuk memperkuat militernya. Sejalan dengan itu, Turki juga telah menyiapkan amunisi tempurnya. Disisi lain, pasokan senjata militer yang dikirim Prancis ke Yunani membuat Turki geram. Sebab, selain karena bantuan militer yang diberikan kepada Yunani, disinyalir Prancis juga menghasut Yunani supaya melawan Turki dan mengabaikan dialog dengan Turki perihal sengketa Mediterania Timur. *Framing* media AA ternyata tidak sampai disitu. Dilain redaksi, AA bahkan membuat opini khusus terkait mengapa Prancis begitu getol menyerang Turki. Sebanyak 23 poin opini tentang ‘Perang Dingin’ antara Turki dan Prancis dibahas dan hampir semua poin seolah ‘menyudutkan’ status Prancis. Salah satu poin yang menarik dibahas adalah *framing* mengenai Prancis yang menerapkan ‘Kemerdekaan Bersyarat’ terhadap 20 negara bekas koloninya di Afrika. AA secara mendalam mengulas tuntas

tentang penyebab ketidaksukaan Prancis atas Turki yang dianggap mengganggu negara-negara Afrika. Karena pada dasarnya negara bekas koloninya tersebut telah dipengaruhi segala hal yang berbau Prancis. Mulai dari Bahasa, budaya, hingga sistem pemerintahan dan perekonomian. Kehadiran maskapai Turkish Airlines di Afrika telah membuat Prancis geram karena negara-negara Afrika menjadi punya opsi lain ketika ingin transit yang semulanya hanya diperbolehkan lewat Paris kini bertambah opsinya ke Istanbul (Guldagi, 2020).

Sederet *framing* media yang dilakukan oleh AA menjadi sinyal berbahaya bagi negara lain yang berkonfrontasi dengan Turki. AA cukup mampu menjadi momok bagi media yang menyudutkan Turki disaat negara tersebut menjadi perhatian serius khususnya negara-negara anggota Uni Eropa. Berkat manuver politik yang ciamik dari Erdogan, “*The New Turkey*” tentunya akan sejalan dengan kebangkitan kanal media *Anadolu Ajansi*. Setelah sebelum pemerintahan Erdogan media tersebut sempat tidak berkembang sepesat saat ini. Dengan kerjasama antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan AA sebagai media yang menyebarluaskan, tentunya akan menjadikannya simbiosis yang saling menguntungkan. Sudah seharusnya negara sebesar dan se-potensial Turki memiliki media sendiri. Sebab, negara adidaya seperti Amerika Serikat, China, dan Inggris sudah terlebih dahulu mengglobalkan narasinya melalui medianya sendiri, seperti CNN, Washington Post, CGTN, The Guardian, Reuters, dan lain sebagainya. Masing-masing media tersebut tentunya memiliki *framing* dan *agenda setting*-nya masing-masing sesuai dengan kebutuhan negaranya. Penelitian ini akan mengulas secara mendalam tentang bagaimana Turki menjadikan AA sebagai media dalam rangka mengglobalkan narasinya. Tentu semua itu butuh proses, karena

proyek “*The New Turkey*” ini belum berusia lama. Dengan semakin berkembang pesatnya industri media, seharusnya AA memiliki peluang yang sama besarnya dengan media dari negara adidaya lain, menilik pergerakan politik dalam maupun luar negeri Turki yang sangat masif juga.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas, penting kiranya bagi penulis untuk mengkaji lebih mendalam tentang faktor apa saja yang membuat Turki memutuskan untuk mengglobalkan narasi politik dalam dan luar negerinya melalui *platform* media berita *Anadolu Ajansi*. Mengingat bahwa kemajuan industri media berkembang begitu pesat dan sejalan dengan ambisi Erdogan menjadikan Turki lebih menggloabal, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran *Anadolu Ajansi* sebagai media untuk mengglobalkan narasi Turki di Ranah Politik Internasional?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi peran *Anadolu Ajansi* dalam mengglobalkan narasi Turki di ranah politik internasional.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menjadikan Turki berambisi untuk mengglobalkan narasinya di ranah media internasional melalui *Anadolu Ajansi*.
3. Untuk menganalisis cara yang dilakukan oleh Turki dalam mengglobalkan narasinya di ranah politik internasional melalui *Anadolu Ajansi*.

1.4 Signifikansi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis ingin melihat peran yang dijalankan media berita Anadolu Ajansi pada masa pemerintahan Erdogan. Dimana AA secara langsung di sponsori oleh pemerintah. Hal ini merupakan kemajuan pesat bagi sepak terjang AA dalam dunia media, yang mana sebelumnya hanya berfokus untuk mengadvokasi isu-isu dalam negeri ke ranah domestik saja, hingga setelahnya menjadi salah satu media Turki yang berfokus membawa isu-isu domestik dan narasi Turki terkait isu politik internasional ke ranah media global. Penelitian ini dianggap penting mengingat ambisi pemerintahan Erdogan yang ingin menjadikan Turki negara lebih mengglobal di ranah politik internasional melalui medianya sendiri. Dan juga melihat kondisi AA yang sebelum pemerintahan Erdogan perkembangannya belum sepesat setelahnya. Selain itu, peran AA juga penting dibahas karena sejalan dengan proyek besar “The New Turkey” yang dicanangkan Erdogan. Tentunya dengan kemajuan industri media akan dimanfaatkan oleh Turki sebagai momentum untuk lebih mengglobal daripada rezim-rezim sebelumnya. Melalui momentum tersebut, Erdogan telah mampu membuktikan bahwa negaranya mampu untuk berbicara banyak di kancah politik internasional melalui medianya. Diantaranya adalah terkait dengan keprihatinan Turki dengan semakin maraknya isu Islamophobia di Eropa. Disitu Turki ingin menyatakan narasinya bahwa Islam pada dasarnya tidak seperti apa yang di-*stereotype*-kan oleh orang-orang Eropa. Selain itu banyak narasi Turki lain yang digaungkan melalui media berita AA ini. Sebagian peneliti telah mengkaji topik terkait AA. Akan tetapi hanya berfokus pada permasalahan isu tertentu terkait narasi Turki, dan beberapa diantaranya hanya membahas teknis terkait *framing media*. Oleh karenanya, penulis ingin melihat dari sisi lain dimana media ini telah terbukti berkembang pesat sejak rezim Erdogan. Penelitian

ini juga akan mengulas cara-cara yang dilakukan AA dalam bekerjasama dengan pemerintahan Erdogan sehingga membentuk kekuatan baru Turki serta dampak yang terjadi akibat pemberitaan dari AA ke ranah global.

1.5 Cakupan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis akan akan meneliti dari segi pemanfaatan *soft power* yaitu media berita dan juga ditinjau dari segi politik global sebagai efek yang ditimbulkan dari pengaruh *framing media* terkait narasi-narasi Turki. Oleh karena itu pada penelitian ini memiliki cakupan waktu yaitu sejak tahun 2015 dimana pada saat itu AA mulai menunjukkan peningkatan pemberitaan media yang signifikan ke ranah global hingga tahun 2019. Sementara itu, cakupan analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan media berita AA sebagai sudut pandang dan variabel utama dalam menganalisis terkait dengan kebangkitan AA dalam pemberitaan tentang narasi Turki di ranah global sebagai wujud dari proyek besar “*The New Turkey*” yang digaungkan pada masa pemerintahan Erdogan.

1.6 Tinjauan Pustaka

Dalam skripsi ini penulis akan menegaskan kembali posisinya dalam menjalankan penelitian. Dimana tentunya penelitian ini akan sarat dengan pembahasan mengenai *framing media* dan *agenda setting* yang dijalankan oleh AA. Kedua hal tersebut sangat penting untuk dibahas mengingat kepentingan serta ambisi Turki dalam rangka untuk turut serta dalam politik internasional yang saat ini sudah sangat lazim dengan adanya media sebagai perantara menyebarluaskan narasi-narasi dari negara-negara tertentu. Oleh karenanya penulis perlu untuk mengutip penelitian-penelitian terdahulu yang sejalan dengan penelitian ini.

Kajian pustaka tentang signifikansi perilaku dari media Anadolu Ajansı terhadap eksistensinya di ranah global terdapat dalam artikel karya Daghan Irak dari University of Huddersfield yang berjudul *“A Close-Knit Bunch: Political Concentration in Turkey's Anadolu Agency through Twitter Interactions”* yang secara garis besar membahas tentang interaksi AA dalam membahas agenda politik Turki melalui *platform* Twitter. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa Partai Keadilan dan Pembangunan Turki atau biasa disebut AKP berupaya mengembangkan jaringan medianya sendiri. Terutama sejak terpilihnya Erdogan sebagai Presiden yang juga merupakan delegasi dari AKP. Sejak terpilihnya Erdogan, Turki mencanangkan suatu program besar yang bernama *“The New Turkey”*. Konsep besar yang diusung Erdogan ini berupaya mengandalkan strategi untuk lebih memanfaatkan kantor berita sebagai media untuk menyebarkan agenda pemerintah. Sejak saat itu juga, kantor berita Anadolu Ajansı (AA) juga mengalami re-strukturisasi demi menciptakan media pro-pemerintah. Perlu diketahui bahwa sebelum AA di sponsori oleh pemerintah pada 2015, media tersebut hanya berfokus mengabarkan berita-berita domestik untuk konsumsi warga negara Turki saja. Namun setelah di sponsori pemerintah, AA menjadi media yang sangat aktif dalam menyebarkan narasi-narasi pemerintah ke kancah global (Irak, 2016).

Disebutkan dalam artikel tersebut, bahwa ada hubungan antara media dengan partai yang disebut Pers-Paralelisme Partai. Secara historis konsep tersebut telah diperkenalkan oleh Collin Seymour-Ure, seorang profesor sekaligus penulis buku *“The Political Impact of Mass Media”*. Konsep tersebut memandang bahwa redaksi yang diterbitkan oleh suatu surat kabar dipengaruhi secara signifikan oleh kebijakan partai. Maka kebangkitan suatu media dalam hal ini akan sejalan dengan kebangkitan suatu

partai, begitupun sebaliknya. AKP telah menjadi partai dengan perkembangan yang pesat, hingga pada 2011, AKP telah memenangkan pemilu legislatif Turki. Sehingga mendapatkan kuasa untuk mengambil kursi aparaturnegara secara mayoritas dan melanjutkan agenda politiknya sendiri. Dengan keleluasaan tersebut, AKP akhirnya berhasil menjadikan AA sebagai salah satu media dengan perkembangan yang begitu signifikan khususnya dimulai pada tahun 2015. Dalam studi terbaru terkait dengan unggahan Twitter AA dari tanggal 1-20 Februari 2015, tertulis bahwa 91.1 persen dari semua konten AA berorientasi pada kebijakan dan narasi Erdogan serta pemerintahannya (Irak, 2016).

Sebagai alat perbandingan, terdapat artikel terkait pengaruh pemberitaan media massa terhadap suatu hubungan bilateral. Artikel tersebut berjudul “Kebijakan Redaksi Surat Kabar Berbahasa Inggris JP dalam Memberitakan Hubungan Indonesia-Singapura”. Artikel ini erat kaitannya tentang implementasi *media diplomacy* yang akan menjadi landasan konsep penelitian ini. Dalam artikel tersebut disebutkan bahwa media massa *The Jakarta Post* atau JP memegang peranan penting dalam menunjang hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura. Media massa tersebut telah menjembatani hubungan kedua negara tersebut melalui pembentukan opini publik dari redaksi pemberitaannya. Peran yang dijalankan oleh JP cukup masif dalam rangka menjaga kestabilan hubungan Indonesia dan Singapura. Pembentukan opini publik juga sangat berpengaruh terhadap respon masyarakat Indonesia. Karena umumnya masyarakat kerap kali mendapat pemberitaan negatif sehingga dapat memicu sentimen negatif yang dapat melukai perasaan nasionalisme. Selain sebagai salah satu mediator antar dua negara tersebut dalam menanggapi isu tertentu, JP telah berperan sebagai alat

diplomasi antar negara ketika melakukan pembahasan atau perundingan suatu isu internasional (Yoedtadi, 2018). Sama halnya dengan AA yang juga memegang peranan penting dalam hal pembentukan opini publik terkait narasi-narasi Turki.

Selanjutnya, literatur terkait dengan kekuatan media yang disponsori oleh pemerintah terdapat dalam artikel karya Tal Samuel Azran yang berjudul *“Al-Jazeera, Qatar, and New Tactics in State-Sponsored Media Diplomacy”*. Secara umum artikel tersebut membahas kekuatan media yang di sponsori oleh negara yang begitu masif dalam mempengaruhi opini publik terkait suatu isu. Dan juga media ini dapat menjadi senjata diplomasi yang bisa mengubah arah kebijakan suatu negara. Pengaruh media yang besar tersebut membuat peta diplomasi semakin luas. Secara khusus, artikel ini menghasilkan temuan dari analisis terkait dengan hubungan antara Al-Jazeera dan Qatar dalam konflik Qatar-Saudi Arabia yang dapat diidentifikasi sebagai model ketiga dari diplomasi media, yaitu model *hybrid*, atau model yang memungkinkan negara mendapatkan kembali kendali atas pesan yang telah dikirimkan melalui media kepada khalayak global. Diplomasi media semacam ini membuat Qatar semakin leluasa dalam menentukan arah kebijakannya. Karena dalam transaksi media tersebut ada pertukaran informasi. Dalam artian Qatar mendapatkan umpan balik dari narasi yang telah disiarkannya melalui media global. Hal tersebut membuat Saudi Arabia geram, sehingga membuat kebijakan bahwa warga negaranya tidak diperbolehkan sama sekali menonton atau mendengarkan berita-berita yang bersumber dari Al-Jazeera. Hal tersebut sesuai dengan survey opini publik yang menghasilkan fakta bahwa Al-Jazeera dianggap sebagai sumber berita yang kredibel dan terpercaya oleh masyarakat Saudi. Dibuktikan dari 69% masyarakat saudi yang menganggap Al-Jazeera “dapat dipercaya”

(vs & 70% untuk Al-Arabiyya). Hal tersebut menunjukkan dampak pemberitaan Al-Jazeera yang cukup masif dalam konflik Saudi-Qatar. Disisi lain, para kritikus mengatakan bahwa Al-Jazeera merupakan media yang menjadi instrumen politik untuk meningkatkan pengaruh Qatar dalam politik global. Dikatakan juga bahwa Al-Jazeera dalam pemberitaannya juga terkesan “berani mengkritik semua orang”, kecuali pemerintah Qatar (Azran, 2013). Sejalan dengan hal tersebut, sejatinya AA dalam hal ini sudah menuju kearah sana. Mencoba menarasikan segala bentuk pembelaan terhadap pemerintah Turki, dan mengkritik secara tajam bagi siapapun yang berlawanan dengan Turki.

Disisi lain, dalam website *politico.eu* terdapat sebuah artikel yang berjudul “*The Organizational Behavior of RT*”. Artikel tersebut secara khusus mengulas tentang pengaruh media Russia, *Russian Today* dalam mempropagandakan isu tertentu demi kepentingan Russia. RT juga termasuk media yang pernah mengalami pasang surut dalam perjalanannya seperti AA. Hanya saja jika AA disponsori oleh pemerintah, RT justru di biyai Kremlin, bukan pemerintah Russia. Diawal pembahasannya, terdapat data yang menyebut bahwa RT ini adalah media yang sangat oportunis yang digunakan sebagai instrumen kebijakan bela negara (dalam hal ini Russia) untuk ikut campur dalam politik negara lain. Jika melihat dari perilaku media ini, dapat di cirikan sebagai media yang memiliki sistem bergaya Soviet. Pada awalnya RT didirikan untuk menghadirkan citra positif Russia kepada dunia. Namun saat ini RT ini dianggap sebagai salah satu media pengacau khususnya di AS disebabkan karena *framing* dan propaganda isunya. Dalam artikel tersebut dijelaskan ada empat perilaku RT, diantaranya: Pertama, dimulai dengan RT yang secara sengaja menentukan topik sensitif secara politik kepada

jurnalisnya dan diakhiri dengan intervensi dari negara. Kedua, proses sosialisasi kepada jurnalis terkait dengan ideologi yang dianut oleh RT. Sosialisasi juga bergantung pada pembentukan loyalitas di ruang redaksi melalui insentif uang dan promosi pekerjaan. Ketiga, RT tidak memiliki kecenderungan politik tertentu. Data yang ditemukan dalam artikel tersebut memaparkan bahwa RT pada masa-masa awal berhaluan kiri, sedangkan dalam perkembangannya kini RT mengadopsi ide-ide sayap kanan. Keempat, RT berfokus pada konten yang justru tidak terkait dengan Russia, alih-alih mewakili Russia secara positif. Melihat dari perilakunya, dapat dikatakan bahwa RT sangat memiliki kecenderungan untuk perang media dan informasi (The Organizational Behavior of RT, 2020).

Kemudian, terdapat literatur terkait kemunculan media baru yang menjadi sarana advokasi bagi rakyat Amerika Latin yang cukup besar dampaknya ke khalayak global, yaitu artikel karya Lee Artz yang berjudul *“TeleSUR, Venevision, and the Bolivarian Revolution: Culture and Class in Media Democracy”*. Dijelaskan bahwasanya TeleSUR ini merupakan media internasional model baru yang bernama *“partisan communication”*, atau komunikasi yang melibatkan rakyat mulai dari kelas pekerja, petani, dan kaum miskin. TeleSUR juga merupakan salah satu peninggalan besar Hugo Chavez yang merupakan *“The Leader of Bolivarian Revolution”*. Media ini datang sebagai alternatif baru selain model *“market model”* layaknya CNN, atau *“independent news model”* seperti Al-Jazeera. Media ini cenderung lebih aktif dalam menyebarkan narasi-narasi kelas pekerja dan orang miskin ke khalayak global. Berbeda dengan media-media yang sebelumnya dibahas, yang hampir semua medianya dikendalikan oleh pemerintah atau golongan elit secara langsung. Pendekatan yang dilakukan media ini

relatif berbeda dengan media-media lain. Dalam berjalannya media ini di dominasi oleh berita-berita, akan tetapi yang menjadi keunikan tersendiri adalah hadirnya program lain seperti siaran musik *tango*, *vallenato*, selain itu juga terdapat film dan telenovela yang berbau politis dan tentunya lebih mewakili kelas pekerja dan orang miskin di Amerika Latin. Dalam hal ini, TeleSUR memberikan model alternatif untuk globalisasi media, model yang secara nyata menggambarkan kekuatan dan konflik kelas sosial (Artz, 2006).

1.7 Kerangka Konsep

Landasan konseptual yang akan dipakai untuk menganalisis serta menjawab pertanyaan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah teori *media diplomacy* yang di populerkan oleh Eytan Gilboa. Pada dasarnya, teori *media diplomacy* merupakan teori yang masih belum lama muncul dalam studi kasus hubungan internasional. Terlebih, teori ini muncul dari fenomena kemunculan media semacam CNN, dan Al-Jazeera yang notabene merupakan media yang cukup aktif menyebarkan narasi-narasi politik baik dari kubu barat ataupun non-barat pada masa akhir hingga pasca Perang Dingin. Dalam disiplin ilmu hubungan internasional terdapat dua pakar dalam teori *media diplomacy* yakni, Eytan Gilboa dan Yoel Cohen. Kedua pakar tersebut memiliki penjelasan terkait definisi dan klasifikasi masing-masing (Gilboa, 2007).

Pada dasarnya, teori *diplomacy media* digunakan untuk menganalisis studi kasus yang erat kaitannya dengan upaya resolusi konflik. Hanya saja dalam perkembangannya teori ini seringkali digunakan oleh negara tertentu untuk menjalankan misi politik luar negerinya. Dalam teori ini mencakup berbagai penggunaan media oleh pejabat atau

mediator untuk mendorong negosiasi dan resolusi konflik. Teori ini membantu menempatkan proses dan urusan diplomatik lain yang berbasis komunikasi seperti *framing* dan *agenda setting* dalam konteks yang tepat. *Framing* dan *agenda setting* tersebut di rancang oleh aktor-aktor yang terlibat dalam upaya resolusi konflik terkait untuk memobilisasi opini publik domestik dan global dengan tujuan mengubah hubungan mereka, atau untuk mengubah suatu kesepakatan. Menurut keterangan Tran Van Dinh, seorang diplomat sekaligus pakar media dan komunikasi dari Vietnam, mengartikan teori *media diplomacy* ini identik dengan ‘diplomasi TV’, yang mana politisi maupun diplomat dapat menggunakan TV untuk propaganda internasional yang pada gilirannya akan menjadi propaganda dalam negeri. Sedangkan menurut Bosah Ebo, mendefinisikan *diplomacy media* sebagai penggunaan media untuk mengartikulasikan dan mempromosikan kebijakan luar negeri. Teori *media diplomacy* sering di salah artikan sebagai *public diplomacy*. Dalam buku rintisan Yoel Cohen tentang *media diplomacy*, terdapat perbedaan antara *media diplomacy* dan *public diplomacy*, diantaranya: *media diplomacy* mencakup semua aspek *public diplomacy* dimana media dilibatkan dalam agenda pemerintah, termasuk pengiriman sinyal oleh pemerintah melalui media, dan penggunaan media sebagai informasi. Sedangkan *public diplomacy* merupakan segala upaya untuk mempengaruhi laporan pers tentang peristiwa, atau perjanjian atas nama negara-bangsa (Gilboa, 2007).

Dengan adanya perbedaan fase dalam proses penyelesaian konflik dan tujuan kebijakan, teori *media diplomacy* mengacu pada pada penggunaan media oleh pejabat untuk berkomunikasi dengan aktor negara dan non-negara, untuk membangun kepercayaan dan memajukan negosiasi, dan untuk memobilisasi dukungan publik untuk

suatu kesepakatan. Berdasarkan perkembangannya, teori *media diplomacy* memiliki tiga varian, diantaranya:

1. *The basic communication variant.*

James Wood telah mengemukakan argumen tentang varian pertama ini yang menyatakan bahwa jika politisi ingin menjalankan resolusi konflik dengan negara lain menggunakan saluran diplomatik yang aman dan privat, maka gunakanlah komunikasi yang terbuka kepada massa, salah satunya adalah melalui TV. Varian ini telah digunakan oleh negara yang memiliki medianya sendiri untuk membentuk *framing* dan menentukan *agenda setting* dalam suatu permasalahan kebijakan luar negeri. Pada dekade 1980an hingga 1990-an, varian ini lebih banyak digunakan sebagai sarana resolusi konflik antara AS dengan beberapa negara Timur Tengah. Selama fase pertama krisis sandera Iran tahun 1979-1981, AS berkomunikasi dengan teroris yang menahan sandera secara eksklusif melalui pers. Kasus lain terjadi pada 1991 ketika Perang Teluk, Menteri Luar negeri AS, James Baker pada waktu itu menyampaikan ultimatum terakhir kepada Saddam Hussein melalui CNN, bukan melalui duta besar AS untuk Irak. Demikian juga pada Januari 1998, Presiden Iran Mohammed Khatami memilih CNN untuk mengirim pesan perdamaian ke AS. Dua konflik tersebut menggunakan televisi global daripada saluran diplomatik tradisional untuk menyampaikan pesan. Beberapa contoh diatas memiliki tujuan yang sama berkaitan dengan fungsi media dalam mempengaruhi pemikiran khalayak global, yaitu membentuk *framing* supaya

masyarakat global memahami narasi apa yang sedang dibangun oleh suatu negara.

2. *The travelling diplomacy variant*

Varian ini memungkinkan penggunaan sebuah koresponden yang mendampingi kepala negara, menteri luar negeri, atau pejabat tinggi lainnya ketika mereka bepergian ke luar negeri untuk menyelesaikan misi diplomatik. Disisi lain, revolusi transportasi semakin memudahkan kepala negara dan menteri untuk terbang ke luar negeri dengan koresponden yang menemani dan melaporkan setiap pergerakan mereka. Perkembangan sedemikian rupa memungkinkan pejabat tinggi untuk menggunakan koresponden di dalam pesawat mereka untuk mengirimkan sinyal, mengajukan proposal, membuat ancaman, dan secara umum berkomunikasi dengan pembuat kebijakan dan khalayak domestik dan global. Contoh dari varian ini adalah '*shuttle diplomacy*' yang dilakukan oleh Henry Kissinger di Timur Tengah. Kissinger menjadi mediator perang Arab-Israel pada 1973. Dia memberi banyak laporan latar belakang, informasi, dan kebocoran dalam upaya untuk mempengaruhi negosiasi dan upaya mediasinya. Mediasi yang dilakukan pada waktu itu berjalan begitu sulit, dan seringkali menemui jalan buntu. Diplomasi media yang dijalankan Kissinger membantu mengamankan konsesi yang dibutuhkan untuk memecahkan kebuntuan. Kissinger mampu meningkatkan hubungan yang lebih intensif dengan korespondennya diatas pesawat, yang mana mereka lebih banyak tahu daripada duta besar AS ditempat yang dikunjunginya. Bagi jurnalis lokal, pembuat kebijakan dan diplomat, kehadiran

koresponden ini sangat bermanfaat baginya karena menjadi sumber informasi instan tentang tujuan dan rencana menteri luar negeri. Dalam perkembangannya, banyak pemimpin negara yang mengadopsi teknik diplomasi media Kissinger. Hal ini membuka peluang bagi diplomasi media, tetapi disisi lain membutuhkan persiapan dan implementasi cermat atas idenya.

3. *The media events variant*

Varian acara media ini dianggap sebagai diplomasi media yang terbaik diantara ketiga varian lain. Varian ini berdampak sangat besar terhadap media global. Karena sifatnya yang menarik khalayak luas di seluruh dunia dan terkadang menggeser siaran televisi yang sudah terjadwal. Dalam hal ini jika terdapat suatu resolusi konflik tertentu, maka akan disiarkan secara langsung, diorganisir diluar media, direncanakan sebelumnya, dan disajikan dengan penghormatan dan upacara. Terdapat tiga efek yang cukup signifikan dari peristiwa media semacam ini: membuat tugas duta besar semakin terkikis sebab kecenderungan penggunaan media sebagai alat diplomasi yang instan dan lebih cepat, memecahkan kebuntuan diplomatik dan menciptakan iklim diplomasi yang kondusif untuk bernegosiasi, dan memungkinkan terciptanya suasana yang menguntungkan untuk menutup kesepakatan tertentu. Dua efek terakhir pada dasarnya sangat penting, karena peristiwa media dapat digunakan dalam setiap negosiasi untuk membangun kepercayaan dan memfasilitasi negosiasi itu sendiri. Serta dapat memobilisasi dukungan publik untuk kesepakatan yang telah dicapai.

Dengan adanya tiga varian diatas, membuat diplomasi media pada dasarnya memiliki efek yang dilematis. Terutama ketika seorang pembuat kebijakan dihadapkan dengan situasi kritis. Televisi maupun media global disisi lain telah meningkatkan kecepatan pertukaran pesan diplomatik secara signifikan. Namun, di lain sisi jika pembuat kebijakan segera menanggapi suatu permasalahan tanpa mempertimbangkan opsi kebijakan dengan hati-hati, sangat mungkin mereka akan membuat kesalahan. Tetapi jika mereka tidak segera atau bahkan tidak memberikan respon sama sekali, maka akan menimbulkan kesan bahwa mereka sedang kebingungan, tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan seolah tidak memiliki kendali atas suatu krisis yang sedang dihadapi. Meskipun dengan kecepatan informasi yang bergulir dapat menyebabkan kesalahan pengambilan kebijakan, hal tersebut juga memungkinkan pembuat kebijakan untuk menanggapi krisis yang berkembang secara efektif. Liputan media atau televisi global dapat berfungsi sebagai penyebar informasi yang bersifat *real time* dan memerlukan tindakan sesegera mungkin. Sehingga akan berdampak pada hasil akhir suatu krisis (Gilboa, 2007).

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan teori *media diplomacy* varian pertama yaitu *the basic communication variant* untuk menjawab rumusan masalah. Dalam hal ini, varian pertama dianggap relevan dengan peran Anadolu Ajansi yang mana media tersebut menggunakan medianya sebagai perantara untuk mengirim pesan kepada khalayak global berkaitan dengan narasi-narasi Turki. Secara khusus, AA telah berkontribusi banyak

dalam menyebarluaskan narasi Turki, misalnya dalam kasus perang pendudukan wilayah atau anaksesi yang dilakukan Armenia kepada Azerbaijan. Dalam studi kasus tersebut Turki memberikan dukungan penuh terhadap Azerbaijan. Dan juga mengirimkan pesan supaya kedua negara tersebut berunding secara damai dalam upaya menyelesaikan konflik (Azzam M. A., 2020b). Dalam studi kasus lain, AA juga telah mengirimkan pesan kepada Prancis supaya menjadi mediator dalam konflik yang melibatkan Turki dan Yunani dalam kasus laut Mediterania Timur yang cukup sengit (Azzam A. , 2020c). Dari dua studi kasus ini dapat dikatakan bahwa varian pertama sangat relevan dalam penerapannya. Pesan yang disampaikan AA melalui medianya dapat mendorong suatu konflik untuk bisa diselesaikan. Baik itu yang melibatkan Turki secara langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut membuktikan bahwa AA menjalankan *framing media* untuk mempengaruhi pemikiran pembaca supaya memihak terhadap narasi Turki.

1.8 Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif yang mengacu pada data yang diperoleh melalui wawancara dan studi literatur supaya dapat memudahkan penulis dalam menganalisis. Penulis akan menggunakan dua jenis data, yang pertama primer dan yang kedua sekunder. Jenis data primer berarti data yang didapatkan berasal dari sumber pertama yang dilakukan dengan mewawancarai narasumber. Sehingga data yang didapatkan akan bergantung kepada seberapa dalam penulis dalam mengeksplorasi pengetahuan dari narasumber. Lalu ada jenis data sekunder yang merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber seperti artikel, jurnal, buku, berita

dan sumber literatur lainnya yang mendukung dalam proses penelitian ini. Kedua jenis data tersebut akan menjadi acuan utama dalam melakukan analisis penelitian ini. Penerapan metode kualitatif dalam penelitian ini akan bersifat analisis, deskriptif dan eksploratif.

1.9 Proses Penelitian

Proses penelitian merupakan serangkaian Langkah-langkah yang ditempuh selama berlangsungnya penelitian. Rangkaian tersebut dimulai dari pra-penelitian hingga hasil dari penelitian yang dikemas supaya menjadi sebuah kesimpulan. Adapun prosedur yang digunakan dalam proses penelitian ini sebagai berikut :

1. Pra Penelitian:

Pra penelitian merupakan proses untuk persiapan penelitian dengan cara melihat data yang terkait dengan penelitian hingga bahan bacaan yang sesuai dengan penelitian. Selain itu dalam prosedur ini penulis akan membuat pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penelitian yang akan diajukan dalam sesi wawancara dengan narasumber.

2. Pengambilan Data:

Pengambilan data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer secara khusus akan dihimpun dari hasil wawancara dengan narasumber. Sedangkan sumber sekunder meliputi jurnal, buku, berita, serta sumber lain yang berkaitan dengan penelitian.

3. Analisis Data

Analisis data akan dilakukan ketika data-data telah secara lengkap dikumpulkan. Langkah-langkah dalam menganalisis data yakni sebagai berikut:

a. Menyiapkan data serta mengorganisir data

Langkah ini dilakukan dengan berfokus pada data yang berasal dari dua sumber yaitu primer dan sekunder. Pengorganisasian data dilakukan dengan cara memilah dua jenis data yang tersedia.

b. Membaca semua data

Membaca data merupakan langkah selanjutnya ketika data telah terkumpulkan dengan lengkap. Dalam proses ini, penulis diharapkan mampu menemukan data yang didapatkan dari berbagai sumber.

c. Pengkodean

Pengkodean merupakan langkah dalam melabelkan data yang diperoleh dari berbagai sumber.

d. Mengaitkan tema dengan data yang didapat

Langkah ini penting dalam mengidentifikasi data selama proses pengkodean. Mengaitkan tema juga dapat membantu dalam menemukan keterhubungan antara tema dan kategori.

e. Interpretasi arti

Langkah terakhir dalam menganalisis data adalah dengan menginterpretasikan data tersebut. Hal ini berfungsi untuk memahami makna data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber. Interpretasi arti juga berguna dalam menjelaskan kembali makna dari data yang didapat.

BAB II

AWAL MULA ANADOLU AJANSI DI SPONSORI PEMERINTAH TURKI

2.1 Media sebagai *Public Broadcasting* Negara di Era Globalisasi

Media terus mengalami perkembangan yang cukup pesat. Keberadaannya telah sangat berpengaruh bagi tatanan negara dan perilaku dari para aktornya. Globalisasi turut mendorong kemajuan media dengan begitu signifikan. Kecepatan informasi yang diterima tentunya memungkinkan negara untuk memanfaatkan media sebagai sarana dalam menyebarkan perumusan kebijakan luar negeri, merespons sikap dari negara lain, maupun hanya sekadar menyiarkan suatu peristiwa dari dalam maupun luar negeri secara *real-time*. Marshal McLuhan, seorang profesor ilmu komunikasi dari Kanada pernah mengemukakan bahwa perpaduan antara kemajuan media, teknologi dan informasi dengan globalisasi seolah membuat dunia ini tanpa batas bagi siapapun yang terjun di dalamnya, dan memungkinkan setiap pelakunya berinteraksi tanpa sekat-sekat antar wilayah, yang ia sebut sebagai “Global Village”. *Global Village* inilah yang menjadi dasar komunikasi yang akan membuat keterlibatan publik terhadap suatu kebijakan negara semakin besar (Mugdha, 2007).

Jika melihat sejarah sebelumnya, para ahli globalisasi telah membahas mengenai bagaimana kemajuan pesat media di abad 21 ini dapat ditelusuri kembali pada abad 18 hingga 19 dimana telah terjadi kemajuan mekanik teknologi yang dimulai dari penemuan Telegraf pada Tahun 1937, itu termasuk perkembangan layanan Pos, Radio, maupun telepon lintas batas. Pada abad 19 itu juga muncullah kantor berita internasional pertama yaitu *Reuters*. Pembukaan kantor berita tersebut membuka jalan

bagi proses media untuk melakukan kodifikasi global. Walaupun begitu, teknologi baru memungkinkan media dapat dijangkau di seluruh dunia adalah pada tahun 1960an ketika satelit komunikasi *geo-stasioner* telah diluncurkan. Dengan adanya satelit tersebut, media komunikasi dengan transmisi elektromagnetik menjadi sepenuhnya mengglobal (Thompson, 1995).

Media massa di abad 21 ini dipandang sebagai salah satu fenomena kemajuan globalisasi yang cukup berpengaruh dalam politik internasional. Ia telah memainkan peran kunci dalam meningkatkan globalisasi, menjadi sarana dalam pertukaran budaya dan informasi yang telah menembus ruang dan waktu melalui siaran berita internasional, program televisi, film dan musik. Seluruh komponen tersebut sejatinya mempunyai andil yang besar dalam agenda politik luar negeri suatu negara. Apa yang dilakukan oleh Korea Selatan dengan mengglobalkan *K-pop* dan *K-drama* merupakan indikasi kuat betapa besarnya pengaruh media dalam mempengaruhi perilaku masyarakat global dengan budaya dan bahkan unsur diplomatis yang terselip didalamnya. Jika menilik sejarah, hingga tahun 1970-an media di sebagian besar negara di dunia hanya memiliki cakupan nasional, namun sejak tahun 1990-an sebagian besar media komunikasi sudah semakin mengglobal, memperluas jangkauannya hingga ke luar negara bangsa untuk menggapai audiens di seluruh dunia. Peralihan sistem media tersebut ditandai dengan ciri-ciri melemahnya intervensi pemerintah dan penurunan peran negara dalam ruang redaksi (Matos, 2012).

Arus media internasional sebagian besar dibantu oleh sistem kapitalisme global, teknologi baru, dan meningkatnya komersialisasi televisi global. Beberapa negara di

Eropa dan AS telah memelopori internasionalisasi media ini, sebagai konsekuensi dari deregulasi media yang di adopsi negara tersebut. Namun, terdapat beberapa kritik terkait peralihan sistem tersebut, diantaranya adalah sistem politik dan budaya yang berbeda jika suatu media pada akhirnya berupaya untuk naik kasta ke ranah global. Sehingga mencegah homogenisasi sepenuhnya, sebagai imbas dari globalisasi media. Oleh karenanya para ahli teori globalisasi mencari solusi atas kebutuhan untuk mengenali percampuran budaya lokal dengan pengaruh asing global, yaitu beralih kepada proses *hibridisasi* dan bukan *homogenisasi*. Solusi tersebut dianggap tepat untuk menangani kompleksitas arus percampuran budaya dalam proses globalisasi ini. Dengan demikian maka akan terbentuk kesadaran akan perbedaan budaya yang merupakan konsekuensi dari percepatan globalisasi media, yang tentunya akan meningkatkan komunikasi, mobilitas, migrasi, perdagangan, investasi, bahkan pariwisata. Istilah lain misalnya, dalam globalisasi budaya ini adalah '*detrterritorialization*', artinya 'peniadaan sekat atau batas-batas teritori'. Dengan ini globalisasi memungkinkan masyarakat lintas batas negara bahkan benua untuk berinteraksi satu sama lain (Matos, 2012, p. 16).

Menurut pandangan Holsti dalam bukunya, *International Politics: A framework for Analysis*, bahwa meluasnya keterlibatan warga negara dalam menentukan kebijakan luar negeri menciptakan dimensi-dimensi penting. Peranan warga negara dari berbagai macam lapisan mulai dari kelompok kelas bawah hingga kelompok kepentingan akan mendorong partisipasi berupa peran dalam menentukan tujuan dan alat politik apa yang harus digunakan dalam menentukan kebijakan tersebut. Seturut dengan hal tersebut, di era globalisasi ini segala interaksi sosial di jembatani oleh media dan teknologi komunikasi. Peran media tentu sangat penting sebagai sarana dalam upaya *Public*

Broadcasting khususnya dalam kemampuannya menciptakan citra positif dan membangun opini publik bagi negara untuk menarik aktor-aktor yang terlibat sehingga mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Politik citra ini pun juga pada kenyataannya telah menggeser dimensi politik internasional. Lewat siaran naratif media yang berupa drama maupun gambar bergerak akan mengkonstruksi pemikiran pemirsa yang menyaksikan dan menciptakan masyarakat dengan kesadaran politik yang tinggi. Karena citra positif ini terbawa arus globalisasi, maka memungkinkan bagi para aktornya baik dari media maupun dari para pejabat untuk semakin mengukuhkan kekuasaannya di ranah politik internasional. Dimensi baru media ini membentuk strategi politik internasional yang diterapkan oleh negara bangsa dari *power politics* menjadi *image politics* (Holsti, 1983).

Peran media yang sedemikian besarnya di era globalisasi tersebutlah yang memunculkan istilah *Media Diplomacy*, yang secara gamblang menggambarkan kondisi dimana media dipergunakan sebagai alat untuk berdiplomasi oleh para pembuat kebijakan. Media dalam hal ini menjadi mediator sebagai perwujudan dimensi baru dalam politik internasional dewasa ini. Sebagaimana pada studi kasus yang pernah terjadi dalam sejarah, dimana Walter Cronkite dari stasiun TV CBS dan Barbara Walters dari ABC yang menjadi perantara komunikasi antara Presiden Mesir, Anwar Sadat dan Perdana Menteri Israel, Menechem Begin. Dalam komunikasi tersebut CBS secara luar biasa berhasil melakukan wawancara terpisah via saluran telepon, kemudian hasil wawancaranya disunting sehingga ketika tayang seolah-olah sedang ada wawancara eksklusif secara langsung antara dua narasumber tersebut. Ini membuktikan bahwa media dapat meminimalisir adanya distorsi negosiasi antara pejabat politik. Disamping

itu, media dalam perkembangannya telah bertransformasi menjadi senjata persuasif yang dapat digunakan untuk mendapatkan kekuasaan, dibanding dengan strategi *coercive* yang cenderung menggunakan kekerasan. Semakin kuat suatu negara dalam penggunaan medianya, maka akan semakin mendorong kebutuhan dan keinginan dari para aktor daripada mengandalkan kebijakan yang berdasarkan keamanan negara bangsa. Dalam hal ini, negara dapat menggunakan kekuatan media berupa propaganda politik. Propaganda ini merupakan agenda penting dalam mendukung kebijakan-kebijakan luar negeri. Seperti yang telah dipraktikkan oleh Amerika Serikat, dimana propaganda medianya begitu kuat sehingga mampu memperjuangkan kepentingan-kepentingannya dalam politik internasional. Hanya saja, dengan semakin kuatnya pengaruh media dalam agenda propaganda, seolah menjadi *trend* bahwasanya media yang terikat oleh suatu negara atau institusi akan cenderung menguntungkan pemiliknya, ataupun institusi yang mengikatnya (Hachten, 1993).

Teori kunci dalam media komunikasi internasional pada dasarnya tumbuh dari studi hubungan internasional. Perkembangan di bidang media dan komunikasi lebih banyak muncul ketika masa Perang Dingin, yang mana pada saat itu lebih di sibukkan dengan agenda bagaimana media dapat membantu mengubah masyarakat tradisional untuk memasukkan mereka ke dalam pusaran kapitalisme. Salah satu ahli teori media dan komunikasi, Wilbur Scharrm pernah menulis karya berjudul "*Mass Media and national development – the role of information in the developing countries*". Gagasan utamanya adalah bahwa media komunikasi internasional dapat digunakan sebagai alat untuk mentransfer model politik-ekonomi Barat kepada masyarakat di negara berkembang yang sedang tumbuh. Scharrm berpendapat bahwa media massa dapat

digunakan oleh elit untuk mempengaruhi masyarakat di negara berkembang supaya menumbuhkan ambisinya, yang akan berhenti untuk berpikiran sempit dan konservatif sehingga akan aktif dalam pengembangan diri mereka sendiri (Matos, 2012, p. 4).

Perkembangan media seiring dengan semakin menguatnya efek globalisasi memunculkan persoalan baru dalam politik internasional. Dengan media yang cenderung dipegang oleh segelintir orang, tentunya akan menghadirkan anggapan bahwa media akan sulit untuk netral. Karena sifat kepemilikannya yang absolut, mau tidak mau media yang dikontrol oleh sekelompok elit ini hanya akan menyerukan kepentingan-kepentingan negara besar. Ketidaknetralan media-media ini sayangnya tidak banyak disadari oleh masyarakat internasional. Sekelompok elit kebanyakan hanya akan memperdulikan kepentingannya tercapai, yaitu citra mereka terbangun dengan positif, dan masyarakat akan semakin memihak kepada agenda-agenda mereka yang disiarkan lewat media. Oleh sebab itu, saat ini telah banyak negara-negara yang mulai meniru cara yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan bahkan Inggris, sebagai dua negara *pioneer* dari *trend* media dan globalisasi. Negara-negara maju semacam Tiongkok, Jepang, Korea, Turki dan beberapa negara Teluk adalah contoh nyata negara yang mulai mengandalkan media sebagai sarana propagandanya. Media di era globalisasi ini memang begitu erat kaitannya dengan kelompok elit dan negara-negara maju. Sebab, perilaku mereka akan sangat mempengaruhi percaturan politik internasional yang semakin dinamis.

Pengaruh media yang dilatarbelakangi oleh intrik politik ini pada dasarnya tidak banyak mengubah peta politik internasional, yang mana hampir semua penguasa adalah

mereka yang datang dari kelompok elit dan negara maju. Dengan kehadiran media di era globalisasi ini seolah-olah membuat negara Dunia Ketiga justru semakin terpuruk. Sifat media yang begitu dinamis membuat negara-negara maju justru semakin mudah dalam menjadikan negara Dunia Ketiga ini sebagai target monopoli mereka. Dalam hal ini, media pada dasarnya juga sulit untuk berkembang menjadi sarana yang dapat digunakan secara merata. Secara tidak langsung posisi media saat ini cukup sulit karena terjebak dalam pusaran para pemilik modal, yang notabene sebagai penyuplai utama dalam keberlangsungan produksi media itu sendiri. Para jurnalis saat ini telah mengalami sedikit perubahan dalam menjalankan tugasnya, dimana yang semula mengumpulkan, menyeleksi data-data, membangun argumen dalam tulisan sedikit terganggu dengan desakan untuk memihak kepada pemilik modal dari media yang menaunginya. Tugas tersebut rasanya begitu berat karena jurnalis pada dasarnya memiliki tugas etis untuk mengkonstruksi berita secara faktual dan berimbang. Peran jurnalis sedikit kabur seiring dengan dominasi pemilik modal yang sarat akan kepentingan (Shinar, 2002).

Berdasarkan perkembangan media pasca perang dingin terbagi menjadi tiga cakupan atau jangkauan. Pertama adalah *multi-territory*, media semacam ini pada umumnya tidak memiliki jangkauan yang cukup luas, dan hanya terbatas pada wilayah teritori atau bisa disebut sebagai media lokal. *Multi-territory media* memiliki keterbatasan pada sumber daya dan pendanaan akibat ketiadaan sponsor yang besar sehingga sulit untuk mendorong media ini meyiarkan berita-berita dalam jangkauan regional. Kedua, media dengan jangkauan pan-regional. Media ini memiliki siaran yang dapat menjangkau Kawasan-kawasan dalam regional. Seperti TeleSUR, yang merupakan

jaringan televisi yang menjadi sarana diplomasi bagi kalangan menengah kebawah di Amerika Latin. TeleSUR telah memiliki saluran berita dalam tiga Bahasa dan mampu menjangkau seluruh kawasan Amerika Selatan. Cakupan terakhir adalah *global media*, yang siarannya telah menjangkau hampir seluruh dunia seperti CNN (yang sudah eksis sebelum perang dingin). Siaran televisi ini telah tersebar tidak hanya di Amerika Serikat saja sebagai kantor berita utamanya, akan tetapi juga mencakup wilayah Eropa, Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Pasifik, dan beberapa negara di Kawasan Afrika. Media global memiliki kecenderungan untuk menyiarkan berita selama 24 jam non-stop dan tentunya tersedia dalam ratusan Bahasa. Dengan jangkauan seluas itu, media global tentunya mampu menyiarkan segala macam peristiwa di seluruh dunia secara *real-time*. Media juga telah membantu memperkuat supremasi budaya Amerika di seluruh dunia berkat dominasi film-film Hollywood dan ekspor serial televisi AS (Chalaby, 2003).

Kantor berita internasional semacam Reuters, AP, UPI dan AFP telah diberi peran lebih oleh ahli media karena telah berkontribusi banyak dalam menyebarluaskan agenda global dan dalam menciptakan persepsi tertentu tentang negara berkembang sebagai tempat 'korupsi, kudeta, dan bencana' bagi khalayak Barat. Baik *The United Nations Educational, Social and Cultural Organisation* (UNESCO) maupun *New World Information and Communication Order* (NWICO) sama-sama diujungi kritik, dijadikan perdebatan besar, dan secara khusus diserang oleh Kritikus Dunia Ketiga terkait dengan dominasi barat dalam penyiaran berita yang dianggap mereproduksi prasangka kolonialisme modern. Fakta tersebut hanya segelintir bukti bahwa media sesungguhnya sangat bergantung kepada pemilik modal. Dunia jurnalistik kerap kali dikritik karena belum mampu untuk mewakili perspektif Dunia Ketiga. Penyebarluasan agenda-agenda

dalam media sangat dipengaruhi oleh kontrol kelompok elit. Sehingga media-media Dunia Ketiga tidak mampu berkembang dan kebanyakan hanya mengimpor berita dari Barat dalam berandanya (Matos, 2012, p. 7).

Tuduhan yang ditujukan terhadap kantor berita Barat adalah bahwa mereka tidak cukup dalam meliput kondisi di negara-negara berkembang. Materi yang diliput dianggap tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan cenderung menguatkan citra yang bias. Namun, tuduhan tersebut dibantah oleh perwakilan dari AS dan Inggris. Mereka mengklarifikasi bahwa liputan-liputan didalam agensi beritanya merupakan permintaan dari kebanyakan khalayak global yang menghubunginya. Sehingga kelompok-kelompok yang berkomitmen pada komunikasi alternatif dan kebijakan untuk mengoreksi distorsi dalam liputan media arus utama tentang berita dari negara-negara berkembang bermunculan setelah serangkaian peristiwa ketimpangan tersebut. Hal tersebut diperkuat dengan fakta bahwa sistem media saat ini Sebagian besar dimiliki oleh perusahaan-perusahaan dari Barat, seperti AS, Inggris, Jerman, bahkan Jepang, dan tidak ada satupun yang berasal dari negara berkembang, baik di Asia maupun Amerika Latin. Para kritikus juga sering melontarkan pendapat bahwa konsentrasi perusahaan media dibawah kendali segelintir pemilik menimbulkan ancaman keanekaragaman, menghambat persaingan yang sehat antar media, berkontribusi memunculkan pandangan konservatif terhadap dunia, dan mengesampingkan perbedaan pendapat atau konten yang tidak menghasilkan keuntungan sehingga dianggap menentang nilai-nilai kapitalis (Matos, 2012, p. 20).

Keempat agensi berita yang telah disebutkan tetap menjadi pemain kunci dalam penyebaran berita dan informasi global, dengan banyak surat kabar dan organisasi media lain di seluruh dunia bergantung pada mereka terkait berita internasional. Mereka dipandang sebagai pusat tesis globalisasi dan terkait erat dengan modernisasi Barat dan perluasan media komunikasi sejak kemunculannya pada pertengahan abad-19. Terbatasnya jumlah agen dan produser sumber berita internasional, juga berkontribusi terhadap homogenisasi budaya global dan konten berita televisi internasional dengan mengutamakan kepentingan Barat dalam politik, ekonomi dan budaya. Mereka juga membantu membentuk hubungan antara internalisasi dan kekuatan lokal, membawa global ke lokal dan sebaliknya melalui kegiatan pengumpulan berita mereka serta membangun agenda internasional yang mempengaruhi pemerintah nasional. Ketidakseimbangan arus mencerminkan warisan sejarah lembaga-lembaga ini dan masih terdeteksi hingga hari ini dalam komunikasi internasional, terlepas dari adanya arus berganda dan arus balik dari Dunia Ketiga ke Dunia Pertama (Matos, 2012, p. 8).

Fakta bahwa sistem media saat ini yang melampaui batas-batas negara-bangsa telah mendorong para ahli teori globalisasi untuk melihat bahwa globalisasi media berkontribusi penting untuk mengikis kekuatan suatu negara untuk mengontrol, mengatur, dan menggunakan media mereka untuk tujuan kebijakan nasional. Globalisasi dipandang telah mengubah sifat dari hubungan kuat antara media dan negara. Walaupun saat ini negara tetap menjadi masalah karena masih dapat berperan dalam bentuk penentuan kebijakan media dan sistem pertelevisian nasional. Globalisasi media pun juga turut di pengaruhi oleh sistem kapitalisme global, yang

mendorong para elit pemilik modal dapat ikut campur dalam kebijakan media. Meningkatnya kekuatan para konglomerat media multinasional tersebut sejatinya telah merongrong kapasitas negara untuk menentukan kebijakan dalam nasional terkait media. Misalnya apa yang dilakukan oleh *News Corporation Rupert Murdoch*, yang telah memiliki jangkauan luas, dengan memiliki anak perusahaan yang tersebar di Eropa, AS, Asia dan Australia. Diantara medianya adalah News Corporation, Disney, Time Warner, Viacom, dan ITC dan agensi pers terkait (seperti CNN, BBC, Reuters, AP, UPI, Bloomberg). News Corporation juga memiliki saluran seperti Fox, The Times, dan The Sun. Murdoch telah berhasil mendirikan kerajaan medianya dengan keberhasilannya membentuk sistem TV satelit diseluruh dunia. Bahkan pada tahun 1990-an, Murdoch mengklaim berhasil menjangkau lebih dari 75% populasi dunia, dan telah meluncurkan sistem satelit di Amerika Latin, Jepang, India, dan China. Bahkan, oleh Sebagian kritikus Murdoch dianggap terlalu kuat dan sulit untuk meruntuhkan hegemoninya (Matos, 2012, p. 19).

Menurut Herman dan McChesney, pasar media global terutama pasca Perang Dingin masih didominasi oleh kepentingan AS dan pasar domestik AS. Melihat bahwa sistem media global telah didominasi oleh 9 atau 10 perusahaan, mereka menganjurkan untuk demokratisasi media yang lebih luas 'dari bawah' dan juga reformasi media. Sebab, media global menunjukkan pergeseran dari hegemoni Amerika menuju kapitalisme transnasional dan menggambarkan bahwa globalisasi sebagai proses yang didorong 'dari atas' oleh raksasa agensi dan korporasi media yang didukung dengan kebijakan deregulasi. Pasar media global digambarkan sebagai persaingan oligopolistik atau persaingan yang tidak sempurna, dimana produsen atau

agensi media terlalu sedikit dibandingkan dengan konsumen atau dalam hal ini media pengimpor berita. Selain itu media global juga terkait dengan kebangkitan sistem ekonomi kapitalis global, yang didukung dengan teknologi digitalisasi baru dan lembaga-lembaga kapitalisme global seperti *World Bank*. Komersialisasi media global pun juga tak luput dari kontribusi besar AS. Model komersialisasi media AS dipandang sebagai strategi yang patut ditiru, terutama oleh Eropa. Pergeseran komersialisasi media global di Eropa banyak dipengaruhi oleh kebijakan ataupun kepentingan AS. Bahkan program-program media TV Amerika masih menjadi tontonan non-domestik yang mendominasi di sebagian besar negara Eropa. Negara-negara Eropa Selatan dan Amerika Latin memiliki jumlah impor tertinggi untuk program TV dari AS, saluran satelit dan kabel semacam *Sky* pun juga berisi program-program AS dalam jumlah yang besar (Edward S. Herman, 2004).

Pasca Perang Dingin, terdapat dua raksasa media global yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan pers dunia, yaitu CNN dan Al-Jazeera. CNN yang dipandang sebagai perwujudan dari perusahaan media global, mulai mengirimkan berita secara langsung pada saat peristiwa Perang Teluk pertama pada tahun 1991. Sejak saat itu para ahli membicarakan tentang dampak potensial dari peliputan berita oleh CNN. Terdapat istilah familiar pada saat itu yang disebut dengan '*CNN Effect*', yang merujuk pada cara peliputan berita CNN yang dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri AS. Disisi lain, pasca serangan teroris 9/11 muncullah Al-Jazeera sebagai stasiun televisi yang menyediakan berita alternatif terkait Perang Teluk pertama. Walaupun Al-Jazeera sudah diluncurkan sejak 1996 oleh pemerintah Qatar, persaingan antara CNN dan Al-Jazeera nyatanya baru dimulai pasca peristiwa 9/11 tersebut. Al-

Jazeera sebagai media yang berasal dari Timur Tengah berupaya untuk memperkuat posisinya di dunia Arab sebagai media yang memfasilitasi forum perdebatan pandangan non-Barat, yang bagi Sebagian banyak orang Arab dapat membantu menentang hegemoni budaya Amerika dan pandangan mereka terkait kebijakan luar negeri. Dengan persaingan dua raksasa media tersebut hingga saat ini, mempelopori banyak negara untuk meniru cara yang dilakukan oleh negara Barat dan non-Barat tersebut. Globalisasi media saat ini telah mendorong negara-negara untuk ikut berperan dalam mempengaruhi pemikiran audiens, dan itu semua bergantung kepada kecondongan media dalam menyajikan beritanya. Masyarakat internasional sejatinya telah banyak mendapatkan alternatif perspektif yang berdasarkan pada bagaimana suatu media melakukan *framing* (Matos, 2012, p. 22).

2.2 Proyek “The New Turkey” Sebagai Titik Balik Anadolu Ajansi

Setelah Erdogan terpilih menjadi Presiden Turki perwakilan dari partai AKP pada 2014, ia mencetuskan sebuah proyek besar berkaitan dengan eksistensi Turki di ranah politik internasional. Proyek tersebut dinamai “The New Turkey”, sebuah konsep yang dibuat Erdogan dan medianya dengan berfokus pada jaringan sosial yang dibentuk secara online didalam sebuah kantor berita atau agensi bernama Anadolu Ajansi (AA). AA diharapkan mampu menjadi simbol penggunaan media yang mewakili serta menyebarkan agenda politik Turki. Disisi lain, AKP telah berupaya sejak lama untuk merencanakan sebuah pengembangan jaringan ekonomi dan sosialnya sendiri, yang telah menciptakan sistem partai dominan dengan kecenderungan hegemonik. Salah

satu dari bagian perencanaannya adalah menciptakan media pro-pemerintah. Hal ini disebabkan karena sebelumnya telah banyak outlet media arus utama yang telah dirampas oleh pemerintah sebelumnya dan dijual sebagai bisnis. AA sendiri sebelumnya adalah sebuah media lokal yang hanya berfokus dibidang pemberitaan dalam negeri. Kemudian sejak AKP mengambil alih pemerintahan Turki AA bersama dengan TRT (Turkish Radio and Television) World telah disubsidi dan di restrukturisasi sejalan dengan agenda pemerintah (Irak, 2016).

Dalam sejarahnya, pada tahun 1920 telah muncul ide untuk mendirikan kantor berita diantara sekelompok intelektual selama perang kemerdekaan Turki, yang akhirnya terciptalah sebuah kantor berita pertama Turki yaitu AA pada 6 April 1920. Ide pembuatan kantor berita tersebut di inisiasi oleh tiga tokoh utama, yaitu Mustafa Kemal Ataturk, Helide Edip Adivar, dan Yunus Nadi Abalioglu. Sejarah AA pada dasarnya hampir semuanya identik dengan Republik Turki. AA didirikan 17 hari sebelum pembukaan Majelis Agung Nasional Turki, dengan misi “menyebarkan suara Anatolia kepada dunia”. AA juga merupakan saksi dari semua episode Perang Kemerdekaan Turki. Sebagai kantor berita global dengan 100 tahun lebih pengalaman yang kuat, AA termasuk dalam sepuluh kantor berita yang paling berpengaruh didunia saat ini. Tujuan utama dalam transformasi AA oleh AKP adalah supaya ketika *global reader* ingin mengetahui segala kebijakan, sikap, maupun perilaku Turki diranah internasional maka diharuskan untuk mendapatkan perspektif dari Turki secara langsung, dan dapat dipastikan bahwa AA adalah tangan pertama dari segala liputan terkait Turki.

AA telah bertransformasi menjadi kantor berita global pada masa rezim Erdogan dan masih terus berkembang hingga saat ini. Sebelumnya, AA hanya sebatas media lokal yang fokusnya terbatas pada lingkup Turki saja, dan juga liputannya hanya bisa diakses oleh masyarakat Turki. Sejak Erdogan menggaungkan proyek “The New Turkey”, maka ia sedang berbicara tentang bagaimana Turki yang ingin bertarung secara elegan dengan negara lain. Dalam konteks media internasional, jika ada berita maka akan dibalas berita. Maka itulah yang disebut sebagai bertarung secara elegan. Disamping itu, jika melihat dinamika media internasional, telah banyak media yang berupaya melakukan *framing* terhadap lawan politiknya. Hal itu menunjukkan bahwa media ingin membangun struktur berpikir serta opini masyarakat umum. Sehingga sangat wajar jika ada media memberitakan negara lain maka akan dibalas dengan berita pula. Hal itu juga dibenarkan oleh jurnalis AA Indonesia, Pizaro Gozali. Ia juga menyatakan bahwa dalam dunia media itu merupakan tindakan yang sah. Banyak orang yang salah menangkap maksud dari media, bahwa itu merupakan perang narasi, sehingga menjadikan media seolah-olah dianggap sebagai alat propaganda. AA berupaya untuk menulis berita sesuai fakta dan data yang riil di lapangan, mengedepankan profesionalisme dan tidak berupaya untuk propaganda. Misalnya, pada saat Presiden Prancis, Emmanuel Macron menyerang Turki lewat argumennya, maka AA akan mengkritisi dengan mengutip pendapat para ulama dan para ahli di Kawasan. Dalam kasus lain seperti konflik Israel-Palestina, banyak negara di Timur Tengah yang menormalisasi hubungannya dengan Israel, maka AA akan kontra dengan kebijakan tersebut karena akan merugikan Palestina. Kembali lagi kepada prinsip yang dipegang

AA dalam jurnalisme media yaitu *voice of voiceless*, yaitu menyediakan wadah untuk bersuara bagi mereka yang tidak memiliki suara yang kuat (Gozali, 2021).

Sementara itu, transisi AA dari media lokal ke ranah internasional sangat dipengaruhi Pers-Partai Paralelisme yang dipraktikkan AKP. Sebuah konsep dimana media dan partai politik memiliki keterkaitan kuat dalam menghasilkan kebijakan negara, atau dalam rangka mengukur bagaimana sistem politik berfungsi di suatu negara. Sejak AKP berkuasa pada tahun 2002, AKP telah menjelma menjadi partai yang dominan, menciptakan ruang politik yang luas bagi Turki di ranah internasional. Perkembangan AA dimulai setelah tahun 2010, dimana kontrol media telah menjadi fokus utama Erdogan dan AKP untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan mengintimidasi oposisi. Penciptaan media pro-pemerintah dan kontrol yang disiplin ini disebut *yandaz media* (media pendukung) oleh oposisi, kemudian diikuti oleh munculnya media-media kumpulan, yang menunjukkan bahwa media pro-pemerintah sedang dibiayai oleh badan-badan pemerintah. Pada tahun 2014, sebanyak 69.3 persen dari total iklan dari 19 perusahaan milik negara diberikan kepada surat kabar pro-pemerintah, dan menghasilkan 27 juta USD dari pendapatan ke media ini. Bahkan ada enam perusahaan milik negara yang memboikot saluran TV yang dekat dengan kelompok oposisi, yaitu Fethullah Gulen. Tentunya ini semakin mempermudah Langkah media pro-pemerintah semacam AA untuk semakin mendominasi media dalam negeri (Irak, 2016, p. 7).

Pada 2013, media pro-pemerintah termasuk AA mendapatkan reputasi buruk dengan terungkapnya bocoran penyadapan yang mengungkapkan bahwa Erdogan

beserta para konsultannya secara langsung campur tangan dalam produksi surat kabar dan saluran TV. Mereka mendikte secara langsung baris editorial dalam menentukan berita-berita yang akan dirilis oleh surat kabar terkait, serta memecat beberapa jurnalis yang dianggap sebagai non-Yandas (tidak mendukung kebijakan pemerintah). Jurnalis-jurnalis tersebut umumnya gemar mengkritik kebijakan negara, terutama masalah Kurdi dan peran militer di Turki yang terkikis, sehingga memunculkan anggapan bahwa Turki adalah “penjara terbesar bagi para jurnalis”. AKP pun juga turut memperburuk reputasi Turki terkait dengan semakin tingginya sensor internet, berkat lebih dari 67.000 URL yang telah diblokir pada Maret 2015. Bahkan, setelah tragedi protes Gezi, dimana peran media sosial begitu besar sehingga mampu menghentikan arus media utama, yang juga termasuk AA didalamnya. Arus protes dilancarkan melalui platform media sosial terutama di Twitter, yang pada akhirnya membuat Erdogan memutuskan untuk memblokir Twitter dalam beberapa jam sehari demi mengurangi derasny arus protes terhadap kebebasan pers tersebut. Eksistensi media arus utama tentu semakin goyah setelah peristiwa tersebut. Namun, pengaruh besar yang terjadi pasca peristiwa tersebut adalah semakin terbukanya kebebasan pers (Irak, 2016, p. 8).

Terkait dengan status hukumnya, AA merupakan agensi yang yang diubah menjadi inkorporasi pada tahun 1925 dari yang sebelumnya agensi korporasi. Setelah perubahan tersebut saham AA dibagikan kepada karyawan agensi. Kemudian, saham sebanyak 47.75 persen ini dikumpulkan oleh Departemen Keuangan Negara yang membuat AA pada dasarnya telah menjadi perusahaan negara diawal-awal masa berdirinya. Pengaturan tersebut terbukti salah, karena CEO AA, Kemal Ozturk secara pribadi mengambil alih 25.65 persen saham yang tidak diklaim pada tahun 2013.

Langkah kontroversial tersebut kemudian dibatalkan pada tahun 2014, setelah Ozturk mengundurkan diri dari jabatannya. Sementara itu, dewan AA yang dipimpin oleh Ozturk justru menolak agensi tersebut untuk di audit oleh Pengadilan Auditor. Ozturk mengklaim bahwa agensi tersebut memiliki status hukum yang sama dengan perusahaan swasta lain. Meskipun negara secara hukum bukan pemegang kendali saham agensi tersebut, pada dasarnya Departemen Keuangan dan Direktorat Jenderal Pers telah memenuhi biaya operasional AA (Irak, 2016, p. 11).

Menurut Departemen Keuangan, pada tahun 2012 AA telah mengalami kerugian operasional sebanyak 26.3 juta Lira Turki, dan kemudian pada tahun 2013 meningkat lebih dari empat kali lipat mencapai 105.7 juta Lira. Disisi lain, wakil Perdana Menteri Bulent Arinc menyatakan bahwa AA telah mengalokasikan 113 juta Lira pada tahun 2011 dan 130 juta Lira pada tahun 2012 dari anggaran negara. Jika dibandingkan dengan tahun 2004 ketika periode pertama AKP, anggaran negara yang dialokasikan untuk agensi tersebut meningkat 540 persen daripada tahun 2012. Angka-angka ini mencerminkan bahwa meskipun AA secara hukum bukan perusahaan milik negara, justru telah dibiayai sebanyak itu selama periode ketiga pemerintahan AKP. Dibalik ketidak-jelasan status hukum AA, akhirnya pada 2014 pasca Erdogan resmi dilantik menjadi Presiden Turki, Erdogan memutuskan untuk memasukkan AA kedalam proyek besarnya yang disebut "The New Turkey". Sejak saat itu AA secara penuh dibiayai oleh pemerintahan AKP dibawah Erdogan, dan menghilangkan kesimpangsiuran terkait status hukum dan kepemilikan saham yang menjadi permasalahan terkait apakah AA merupakan perusahaan milik negara atau swasta (Irak, 2016, p. 12).

BAB III

STRATEGI ANADOLU AJANSI DALAM MENGGLOBALKAN NARASI TURKI

Sebagai kanal media yang belum cukup lama disponsori oleh pemerintah, AA memiliki tugas utama yaitu menyebarluaskan berita-berita teraktual dan terpercaya mengenai Turki serta kebijakan-kebijakan pemerintahnya kepada khalayak global. Bagi AA tugas yang diamanatkan pemerintah tersebut bisa memperkuat pengaruhnya di ranah media global. AA tentunya memiliki strategi dalam misi menyebarluaskan narasi Turki, baik itu kebijakan luar negeri ataupun agenda-agenda lain. Secara spesifik strategi tersebut dapat dikategorikan dalam tiga fokus utama; *Pertama* adalah berita terkait Turki. Secara tegas AA memiliki misi untuk menunjukkan bahwa Turki ingin menjadi salah satu aktor dengan legitimasi kuat dalam kancah politik internasional. Maka dari itu AA ingin menunjukkan kepada pembaca global bahwa sumber-sumber beritanya didapatkan langsung dari perspektif orang Turki. *Kedua* adalah berita terkait Islam. Pada dasarnya AA memiliki ciri khas dalam memberitakan dunia Islam, yaitu mengutip sumber-sumber yang secara langsung didapatkan dari perspektif ulama-ulama dikawasan. Hal ini menunjukkan bahwa AA juga berkomitmen untuk mendorong media negara mayoritas Muslim semakin berkembang dan mampu menjadi delegasi di ranah media global. *Ketiga* adalah isu-isu kemanusiaan. AA berkomitmen kuat dalam menggaungkan prinsip medianya yaitu *voice of voiceless*, menjadi media yang menyuarakan aspirasi bagi mereka yang tertindas, baik karena konflik dalam negeri, bencana alam, maupun isu-isu kemanusiaan lainnya. Ketiga fokus ini akan menjadi pondasi kuat AA dalam membangun eksistensinya di kancah media global. Dengan

fenomena media yang disponsori pemerintah, hal ini bisa menjadi momentum bagi Turki dan identitas islam yang melekat padanya untuk menjadi aktor dalam politik internasional. Penulis akan menggunakan variabel *basic communication variant* dalam teori *Media Diplomacy* untuk menganalisis strategi AA dalam mengglobalkan narasi Turki. Penulis juga melakukan pengambilan data melalui wawancara untuk mengidentifikasi ide dasar pembentukan strategi pemberitaan AA (Gozali, 2021).

3.1 Fokus AA dalam Isu-isu Terkait Turki

A. Peningkatan Kerjasama Turki di Somalia

Studi kasus pertama pemberitaan AA terkait Turki adalah hubungan diplomatiknya yang erat dengan Somalia, terutama dibidang ekonomi dan kerjasama seputar keamanan nasional. Hubungan diplomatik tersebut pada dasarnya memiliki sejarah yang panjang. Namun, hubungan kedua negara tersebut semakin membaik sejak kunjungan pertama Erdogan pada 2011 ketika masih menjadi PM Turki. Penguatan pengaruh Turki di negara tanduk Afrika tersebut ditandai dengan semakin masifnya investasi ekonomi. Mulai makanan, penyediaan barang-barang keperluan harian, hingga berbagai jasa ditawarkan. Bahkan, telah banyak pengusaha maupun pekerja bantuan dari Turki yang tersebar dibeberapa rumah sakit, pelabuhan, dan lembaga kemanusiaan di ibukota Mogadishu. Somalia yang kala itu mengalami krisis kemanusiaan cukup mengkhawatirkan pada gilirannya mengundang Turki untuk merintis sebuah kerjasama sebagai titik balik perubahan Somalia. Turki yang ketika itu melihat Somalia kehilangan harapan untuk bangkit mengajak untuk memulai diskusi tingkat tinggi secara teratur, pertukaran delegasi dan kerjasama di forum internasional. Disisi lain, kerjasama ini

mendorong Turki untuk berinvestasi secara besar-besaran di Somalia. Kedekatan hubungan diplomatik tersebut tercermin dari banyaknya industri maupun toko di Mogadishu yang secara terbuka mengiklankan kepada khalayak global bahwa produk mereka adalah barang asli Turki, tidak sedikit pula bahkan yang menamai tokonya dengan nama-nama kota Turki seolah-olah berupaya mengautentikasi produk mereka (Obsiye, 2019a).

Dilihat dari sudut pandang global, pada dasarnya tidak banyak negara yang mau untuk menjalin kerjasama dengan Somalia, melihat dari reputasinya sebagai 'negara gagal'. Namun, dengan kesabaran Turki dalam menguatkan *soft power* nya tersebut, setidaknya dari sejak kunjungan pertama Erdogan pada 2011 hingga 2019 hubungan kedua negara menguat, dan bahkan membuka peluang bagi orang Somalia, baik diaspora maupun lainnya, untuk pindah ke Turki dengan tujuan untuk tinggal, bekerja, dan mendirikan bisnis. Ketersediaan visa dari Somalia, peluang ekonomi, dan kemudahan dalam berinvestasi menjadi daya tarik bagi orang Somalia yang cenderung nomaden untuk datang ke Turki. *Soft-power* Turki bahkan sedikit banyak telah mengubah aspek bahasa orang Somalia. Saat ini, Bahasa Turki secara tersirat seolah telah menjadi bahasa kedua yang digunakan orang Somalia selain Bahasa Arab dan Inggris yang dominan. Sekolah-sekolah yang didirikan Turki di Somalia juga dipandang sebagai tujuan pendidikan yang terbaik. Selain itu, peluang beasiswa akademik Turki juga terbuka lebar, bahkan lebih dari 2.000 mahasiswa dari Somalia telah menempuh jenjang pendidikan tinggi di Turki. Ketika hubungan ekonomi dan pendidikan semakin dalam, maka Bahasa Turki tidak diragukan lagi akan menjadi lebih penting (Obsiye, 2019b).

Liputan tersebut ditegaskan dalam sebuah artikel karya Omar Abdulle, seorang Magister Ilmu Politik di Sakarya University, Turki. Menurut Abdulle, terdapat empat faktor utama Turki menjadikan Somalia sebagai mitra dalam politik luar negeri. Pertama adalah faktor sejarah, dimana Dinasti Utsmaniyyah sejak dahulu sudah menjadi sekutu Somalia dan memiliki kerjasama politik, ekonomi dan militer. Somalia juga merupakan bagian dari wilayah Dinasti Utsmaniyyah, yang pada tahun 1517 kerajaan tersebut sudah mencapai Somalia Utara dan Selatan. Saat itu juga Somalia banyak dibantu oleh Dinasti Utsmaniyyah mengusir penjajah Portugis yang mengincar sumber daya alam. Faktor kedua adalah letak geografis yang strategis serta sumber daya alam yang belum banyak diproduksi. Somalia memiliki garis pantai terpanjang di Afrika dan sumber daya alam yang melimpah. Sayangnya, hal itu tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang memadai. Oleh sebab itu, Turki melihat situasi tersebut sebagai peluang kebijakan luar negeri, yang juga akan membantu Somalia memulihkan kondisi negara sehingga memiliki masa depan yang lebih baik. Turki juga mempunyai pangkalan militer di Somalia, menjadikannya pangkalan militer luar negeri terbesar kedua setelah di Qatar. Faktor ketiga adalah agama. Baik Turki maupun Somalia memiliki penduduk mayoritas Muslim, hal ini tentunya tidak akan mempersulit kebijakan luar negeri Turki. Kesamaan identitas ini seakan jadi karpet merah yang menyambut Turki untuk menggulirkan kebijakan luar negerinya. Faktor terakhir yang menjadi alasan utama Turki adalah faktor kemanusiaan. Sebagai negara yang dilanda banyak konflik, baik dari dalam maupun luar negeri, Turki datang untuk membuka tangan kepada Somalia yang tertimpa kekeringan parah dan ancaman terorisme yang nyata. Pembuat kebijakan luar negeri Turki sejak 2011 sudah gencar memberikan bantuan luar negeri dan kemanusiaan yang

aktif untuk mengatasi kekeringan tersebut dan meluncurkan kampanye global untuk menggalang bantuan intensif kepada Somalia (Abdulle, 2019).

Dari kutipan berita tersebut, AA membuat sebuah redaksi yang cukup berbeda dari yang media lain beritakan. Orientasi AA sangat tertuju pada kebijakan-kebijakan yang dijalankan Turki di Somalia, bahkan sampai detail terkecil. Secara eksplisit, Turki ingin menonjolkan pola kebijakan luar negeri dengan pendekatan budaya, sesuatu yang tidak begitu disorot oleh media lain. Sebagai akibat dari pendekatan tersebut, Somalia menjadi mitra yang sangat bisa diandalkan. Sebab, kepercayaan Somalia terhadap Turki telah mengakar sampai ke budaya bahkan bahasanya. Banyak aspek kehidupan dalam lingkup warga Somalia yang telah dimasuki unsur Turki, yang membuat kerjasama semakin erat. Turki seolah mengirimkan sinyal pada khalayak global bahwa menjalin kerjasama dengan Somalia adalah keputusan yang tepat ketika banyak negara yang memandang negara tersebut minim sumber daya. Dengan adanya berita tersebut, tentu akan menarik negara lain untuk bermitra dengan Somalia. Namun Turki telah melakukannya terlebih dulu.

Mengacu pada teori *Media Diplomacy: Basic Communication Variant*, yang menerangkan bahwa media dapat menjadi alat komunikasi untuk mengirim sinyal kepada khalayak global, dan media tersebut adalah satu-satunya perantara yang bisa diandalkan, maka apa yang dilakukan oleh Turki sangatlah tepat. Dalam hal ini, AA telah melakukan salah satu tugas utama yaitu memproyeksikan narasi Turki, dimana pada saat yang sama, Turki pun sadar bahwa dalam misi mengglobalkan narasi ini diperlukan sebuah media yang sangat mampu untuk diandalkan. Oleh sebab itu, AA dapat menjadi

media utama yang dapat dimanfaatkan. Karena Turki tidak akan mungkin menggunakan media luar, terutama yang berafiliasi dengan negara. Media luar negeri tentu akan memiliki agendanya sendiri, terutama yang berkaitan dengan kepentingan negara. Dalam upayanya membangun narasi, Turki sangat memperhatikan betul sumber yang didapat untuk sebuah berita wajib mengambil perspektif orang Turki. Hal ini akan menguatkan argumen pembaca sehingga memahami betul kebijakan luar negeri yang tertuang dalam suatu liputan. Didalam studi kasus ini, AA juga sangat memperhatikan prinsip medianya yaitu '*voice of voiceless*'. Pandangan global kepada Somalia yang buruk serta sarat dengan konflik tidak membuat Turki mundur dalam menjalin kerjasama dengan Somalia. Turki menganggap posisi Somalia masuk dalam kategori negara yang '*voiceless*'. Terutama dalam sektor sumber daya alam dan manusia. Dengan kerjasama tersebut, Somalia juga akan diuntungkan dari segi legitimasi di ranah global, serta sumber dayanya yang dimanfaatkan dengan baik, dan bukan dengan eksploitasi. Karena latar belakang agama yang kuat, Turki hanya akan menjadikan Somalia sebagai mitra yang baik, dan jaringan penghubung yang menjanjikan ke negara Afrika lain.

B. Turki Sebagai Mitra Balkan yang Menjanjikan

Studi kasus kedua adalah ketika tahun 2016, upaya Turki untuk memperkuat legitimasi politiknya telah dilanjutkan kembali di kawasan Balkan. Kawasan tersebut telah dilanda masalah serius, diantaranya konflik minoritas, perpecahan agama dan etnis, hingga perjanjian Dayton yang mengakhiri perang berdarah yang terjadi setelah pecahnya Yugoslavia. Negara-negara Balkan yang terdampak nyata oleh bantuan dan kerjasama Turki diantaranya; Serbia, Makedonia, Bosnia-Herzegovina, dan Kosovo. Turki

yang memiliki ikatan sejarah dan budaya yang kuat di Balkan, berupaya untuk menjadikan kawasan tersebut sebagai elemen kunci dalam agenda kebijakan luar negerinya. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah bahwa keberadaan Turki dalam hal ini bukan dengan fokus terhadap krisis yang melanda Balkan kala itu, akan tetapi berfokus pada visi yang secara spesifik tertuju pada dimensi ekonomi, sosial, dan budaya. Menurut strategi Kementerian Luar Negeri Turki tahun 2013, kebijakan Balkan dibentuk dengan tiga tumpuan utama; *Pertama*, dialog politik tingkat tinggi. *Kedua*, peningkatan integrasi ekonomi. *Ketiga*, pelestarian wilayah multi-etnis, multikultural, multi-struktur sosial agama. Tiga tumpuan utama tersebut tentunya akan secara langsung berdampak terhadap pemulihan kondisi Balkan akibat serangkaian konflik yang terjadi (Muhasilovic, 2016a).

Sebagai kontribusi nyata Turki dalam kebijakannya di Balkan, Turki memiliki institusi bernama Turkish Cooperation and Coordination Agency (TIKA) yang menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, bantuan kemanusiaan, dan penyediaan lapangan kerja. Institusi tersebut begitu terasa dampaknya di Balkan. Menurut data yang dipublikasikan, bentuk bantuan spesifiknya adalah sebagai berikut: 45.5 persen kesehatan, 20.49 persen administrasi dan masyarakat sipil, 15.81 pendidikan, 14.78 restorasi budaya, dan 3.45 persen pengadaan kebersihan air. Dengan data tersebut membuktikan besarnya pengaruh Turki di Balkan. Komitmen yang ditunjukkan membuat Balkan semakin terbuka untuk menjalin kerjasama lebih kuat. Pembangunan tempat ibadah Kristen berupa restorasi telah diproyeksikan di beberapa kota di Republik Makedonia. Selain itu TIKA juga melengkapi fasilitas-fasilitas di beberapa gereja di Bosnia-Herzegovina berupa alarm kebakaran serta perencanaan lingkungan. Hal ini juga

mengindikasikan bahwa agenda TIKa dalam mengupayakan kerjasama yang lebih banyak dengan pendekatan inklusif tanpa diskriminasi (Muhasilovic, 2016b).

Karena basis kerjasama Turki dan Balkan adalah visi dan bukanlah kepentingan pribadi secara mutlak, maka Turki selalu berupaya untuk menghilangkan anggapan tentang hubungan antara identitas sebagai negara mayoritas Muslim dengan visinya di Balkan yang cenderung lebih multi-religi. Oleh sebab itu perencanaan restorasi masjid yang diproyeksikan oleh TIKa justru menjadi prioritas ke empat. Mayoritas dari restorasi masjid tersebut berada di kawasan Kosovo, yang mempunyai 90 persen populasi Muslim. Kehadiran Turki di Balkan justru perlahan menghapus ektrimisme yang sering disematkan terhadap umat Islam. Hal tersebut dibenarkan oleh Joseph J. Kaminski, seorang profesor HI di International University of Sarajevo. Ia menyebut bahwa Muslim di Kosovo mempunyai banyak kesamaan. Salah satu diantaranya adalah mengacu pada sekte Hanafi. Hal itu tak lepas dari pengaruh besar Turki yang menanamkan nilai-nilai anti-ekstrimisme sehingga sangat sedikit jumlah Muslim Kosovo yang bergabung dengan kelompok-kelompok radikal. Orang-orang Kosovo sangat menghargai upaya Turki di negara tersebut. Di kota Prizren contohnya, orang-orang Prizren banyak yang menggunakan bahasa Turki. Disamping itu, banyak bangunan kafe dan tata letak kota dengan gaya arsitektur Ottoman (Muhasilovic, 2016c).

Sektor pendidikan juga dikembangkan dalam kebijakan luar negeri Turki. Misalnya, terdapat dua universitas di Bosnia Herzegovina yang didirikan pemerintah setempat akan tetapi telah dioperasikan Turki dalam satu dekade terakhir, yaitu *International University of Sarajevo* dan *Burch International University*. Dua universitas

tersebut juga menggunakan kurikulum yang disusun Turki. Ini merupakan contoh dari efisiensi dalam kebijakan luar negeri *soft power* dalam mendukung kebijakan resmi pemerintah. Seiring dengan semakin masifnya kegiatan pendidikan dan budaya di kawasan Balkan, tidak membuat semua orang yang tinggal disana nyaman. Beberapa orang kerap kali menghasut Turki dengan pelabelan kebijakan luar negeri 'Neo-Ottomanisme'. Padahal yang dilakukan Turki justru membuat warisan budaya tetap dipertahankan di kawasan tersebut. Disebutkan oleh Prof. Dr. Metin Izeti dari Universitas Tetovo di Makedonia, Turki dapat menjadi perisai untuk melawan ekstrimisme di kawasan tersebut. Karena dengan warisan budaya yang dipertahankan, serta doktrin agama yang radikal yang perlahan disingkirkan, akan meminimalisir terjadinya konflik-konflik seperti yang sudah terjadi sebelumnya, yang kebanyakan berlatar belakang etnis dan agama (Muhasilovic, 2016d).

Keberhasilan Turki dalam menjalankan *soft power*-nya di Balkan terdapat dalam artikel karya Bedrudin Brljavac. Artikel tersebut mengungkap fakta historis dari hubungan Turki-Balkan yang sudah terjalin sejak akhir abad 19 hingga awal abad 20an, dimana kekuasaan Ottoman runtuh dan menyisakan banyak warisan di kawasan tersebut. Dengan fakta historis tersebut, Turki juga telah menandai awal kebijakan luar negerinya di kawasan tersebut pada tahun 1990an. Hubungan kedua pihak kerap kali pasang surut. Namun, sejak Partai AKP mulai stabil kekuasaannya, hal tersebut turut membawa perubahan positif dalam kebijakan luar negeri Turki di Balkan. AKP telah benar-benar mengubah tatanan politik dan ekonomi masyarakat pada level yang lebih tinggi. Disisi lain, Uni Eropa juga tidak mampu berbuat banyak di Balkan terkait konflik etnis. Bagi Balkan, kekuasaan Uni Eropa di Kawasan tersebut justru menjadi harapan

yang jauh, sementara gelombang kebijakan justru mengarah ke Turki, sebagai negara yang memiliki stabilitas ekonomi yang konsisten, dan letak geografi yang strategis. Dengan modal ekonomi yang kuat, Turki dimasa depan dapat membawa investasi yang sangat dibutuhkan yang dapat menopang ekonomi Balkan yang sedang tidak stabil. Dan Turki juga telah mengintegrasikan wilayah Balkan (terutama bagian barat) ke pasar internal Turki yang besar, serta pasar di Asia Tengah dan Timur Tengah dimana Turki akan memainkan peran yang sentral dalam kerjasama tersebut. Dengan Turki yang dinilai akan sangat handal dalam menghubungkan pasar ke kawasan tersebut, maka dimasa mendatang Balkan akan juga semakin diuntungkan dengan hubungannya bersama Turki (Brljavac, 2013a).

Pendekatan *soft power* Turki di Balkan juga membuat negara yang mayoritas Ortodoks turut menganggap Turki sebagai teman. Misalnya Kroasia, yang menurut *Survey Gallup* pada tahun 2011 mencatat bahwa persentase penduduk yang menganggap Turki sebagai negara sahabat sebesar 33.5% dari tahun sebelumnya yang menyentuh angka 26.7%. Selain itu terdapat Serbia yang juga meningkat dari 18.2% menjadi 19%. Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan *socio-cultural multi-religion* yang dilakukan Turki berjalan dengan baik, walaupun tingkat kepercayaan warga Balkan tidak naik signifikan. Akan tetapi dimasa mendatang, kemungkinan angka tersebut semakin signifikan. Disisi lain, kekuatan *soft-power* Turki telah berkembang pesat di negara mayoritas Muslim Balkan. Menurut survey yang sama, tingkat kepercayaan Turki sangat baik, seperti 75.1% penduduk Albania, 60.2% Penduduk Bosnia Herzegovina, 93.2% penduduk Kosovo, dan 76.6% penduduk Makedonia (Brljavac, 2013b).

Untuk urusan kebijakan luar negeri, Turki menjadi yang terbaik di Balkan. Jauh melampaui Uni Eropa dan Amerika Serikat. Salah satu kebijakan yang berdampak positif terhadap warga Balkan adalah ditiadakannya visa untuk berkunjung ke Turki. Tidak seperti Uni Eropa yang memberlakukan visa jika ingin berkunjung ke negaranya. Dampak positif lain yang berubah di kawasan Balkan adalah hubungan dengan Serbia, yang bisa dikatakan tidak sangat banyak sentimen Anti-Turki secara regional, pelan-pelan mulai terjalin hubungan bilateral yang baik. Pejabat Turki maupun Serbia sebelumnya tidak pernah mengunjungi satu sama lain selama lebih dari dua dekade terakhir. Namun, sejak 2010 kunjungan lebih sering dilakukan baik oleh Turki yang diwakili Presiden Gul, PM Erdogan maupun perwakilan Serbia, presiden Tadic, PM Mirko Cvetkovic (Brljavac, 2013c).

Dari studi kasus tersebut, AA ingin meliput lebih dalam kebijakan Turki di Balkan. Beberapa media lain seperti Washington Post pada dasarnya juga meliput tentang kebijakan tersebut. Hanya saja, penyajian informasi dari Washington Post hanya terbatas di wilayah Bosnia saja. Washington Post menyorot kebijakan pendidikan yang diterapkan Turki di Bosnia, yang sangat kental dengan budaya Ottoman. Diantaranya adalah beasiswa yang disediakan, tenaga pengajar yang banyak berasal dari Turki, hingga pertukaran pelajar Turki dan Bosnia. Sedangkan liputan AA lebih mengarah kepada kebijakan ke wilayah tersebut secara keseluruhan dan komprehensif. Jika melihat kepada sejarahnya, Turki bahkan telah memulai hubungan diplomatik dengan Balkan sejak 1990-an. Namun, dalam satu dekade terakhir, keterlibatan Turki semakin masif di Balkan. Apa yang diberitakan AA mencerminkan kebijakan pemerintah Turki yang sangat gencar. Liputan diatas secara garis besar menyoroti kebijakan pendidikan,

ekonomi, sosial, budaya, bahkan infrastruktur. Pengaruhnya pun juga begitu besar di hampir semua sektor. Ini mengindikasikan bahwa Turki, selain sangat serius dalam misi di Balkan, juga membutuhkan alat untuk menyebarluaskan narasinya.

Turki tidak melihat media lain bahkan dalam tingkat global yang benar-benar serius dalam misi tersebut. Washington Post memiliki berita yang serupa dengan AA. Namun, perspektif yang dituangkan dalam redaksinya tidak mewakili sebenarnya perspektif orang Turki maupun Balkan. Oleh karenanya, AA tentu memprioritaskan liputannya disajikan dari perspektif Turki, yang dalam hal ini diwakili oleh Selin Calik Muhasilovic. Seorang jurnalis Turki yang memiliki keturunan Bosnia. Inilah yang menjadi salah satu ciri khas tersendiri dari AA, yaitu menghadirkan narasumber yang berpengalaman terkait studi Turki maupun yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah Turki. Hal ini sangat relevan dengan teori *Media Diplomacy: Basic Communication Variant*, yang mengharuskan suatu media terafiliasi dengan negara. Sehingga dapat membentuk sebuah narasi yang memiliki kepentingan penuh terhadap kebijakan negara. Melalui narasumber yang ditentukan oleh *outlet* media, pemerintah bisa mengandalkan medianya sendiri untuk mengirimkan sinyal kepada global terkait kebijakannya. Dalam hal ini, Turki seperti ingin memberi sinyal kepada Uni Eropa, bahwa kebijakan Turki telah melebihi pencapaian keterlibatan Uni Eropa di kawasan tersebut. Bahkan, Turki sangat berpeluang untuk membuat Balkan secara budaya akan mengikuti Turki, dan juga menggagas lebih banyak kebijakan di Balkan seiring dengan berkembang pesatnya hubungan dalam satu dekade terakhir.

C. Suara Mayoritas Untuk AKP Menarik Kerjasama dengan Uni Eropa

Studi kasus ketiga adalah ada tahun 2015, ketika kerjasama lain telah diupayakan, kali ini antara Uni Eropa dan Turki. Setelah Partai AKP mendapatkan mayoritas suara dalam penghitungan cepat. Partai AKP telah mendapat 49.48 suara dalam pemilu tersebut. Angka tersebut jauh lebih baik dari yang diprediksikan para analis. Catatan penting dalam pemilu tersebut juga adalah tingkat partisipasi pemilih yang semakin tinggi, yang mencerminkan komitmen kuat masyarakat Turki dalam demokrasi. Kerjasama Turki-UE secara spesifik membahas mengenai penyelesaian krisis pengungsi yang dihadapi 28 blok negara UE. Krisis pengungsi pada tahun tersebut bisa dikatakan sebagai yang terburuk sejak Perang Dunia II. UE telah membuka jalan negosiasi dengan Turki perihal penanganan pengungsi tersebut, dimana 28 negara telah menawarkan dana kepada Turki untuk mengurangi aliran pencari suaka yang datang ke Eropa di tahun-tahun mendatang. Sebagai imbalannya, UE akan memudahkan aturan perjalanan visa bagi warga negara Turki yang ingin mengunjungi Eropa. Badan perbatasan UE, Frontex mencatat sampai bulan November 2015 sebanyak 710.000 pengungsi yang berasal dari Irak dan Suriah telah memasuki kawasan Uni Eropa dalam sembilan bulan terakhir, dengan banyak diantaranya melakukan perjalanan melalui Turki, dan kemungkinan akan terus bertambah. Bahkan di Turki sendiri telah menampung lebih dari 2 juta pengungsi dari Suriah (Bruksel, 2015).

Dalam *website* resmi UE, kesepakatan Kerjasama UE-Turki juga sudah resmi dimulai pada September 2015. Kerjasama tersebut mencakup tentang *action plan* UE dalam menanggulangi arus pengungsi Irak dan Suriah dari Turki yang semakin tidak terkendali. *Action plan* tersebut akan dilakukan dengan dua acara; Pertama, dengan memberikan bantuan kepada pengungsi dan juga Turki untuk mengurangi beban

sumber daya yang dikerahkannya untuk pengungsi tersebut. Selain itu, pada bagian pertama ini UE-Turki akan mengupayakan untuk menciptakan kondisi kehidupan yang lebih baik kepada pengungsi, dan mengatasi faktor-faktor kunci yang membuat pengungsi pindah ke Turki maupun ke EU dengan tujuan mencari suaka alternatif. Kedua, karena arus pengungsi tersebut begitu deras sehingga sulit untuk mengidentifikasi pengungsi mana yang memang membutuhkan suaka maupun yang gelap atau illegal. Maka akan dilakukan pengawasan ketat di batas-batas negara dan juga di garis pantai. Pada bagian ini, UE-Turki juga akan meningkatkan pengawasan terhadap ancaman perang dari jaringan kriminal yang terlibat dalam penyelundupan migran gelap. Selain itu, UE-Turki juga berupaya untuk memastikan pemulangan segera para migran ke negara asalnya jika kondisi negaranya sudah stabil. Pemulangan tersebut juga berlaku terhadap migran gelap yang tidak membutuhkan suaka maupun perlindungan internasional (EU, 2015).

Sebagai media yang disponsori pemerintah dari Partai AKP, AA dalam hal ini telah berupaya untuk menjadi perantara dalam penyebarluasan informasi terkait kebijakan terhadap pengungsi dari Irak-Suriah. Hal ini menjadi hubungan kuat terkait Pers-Paralelisme Partai, strategi yang diusung AKP dalam menghadapi politik internasional yang semakin dinamis, dengan penggunaan media arus utama yang lebih gencar dari tahun-tahun sebelumnya. Strategi tersebut membawa sebuah keuntungan diplomatik untuk Turki untuk menegaskan legitimasinya, yang dalam hal ini kepada Uni Eropa. Kerjasama yang diusung UE-Turki dalam laporan tersebut mencerminkan komitmen hubungan yang baik. Dalam kasus ini, terlihat baik UE maupun Turki kesulitan dengan derasnya arus pengungsi. Oleh karena itu, kerjasama tersebut bermaksud untuk

meringankan beban kedua belah pihak. Terutama Turki yang menjadi pintu utama masuknya pengungsi dari Suriah. Walaupun UE belum menampung pengungsi sebanyak Turki, namun potensi membludaknya pengungsi sangat besar. Terlebih, aksesnya bisa dijangkau lewat jalur darat dan laut. Kekhawatiran jelas terasa bagi UE, yang menganggap pengungsi tersebut dapat menjadi ancaman keamanan regional Eropa. Disisi lain, Turki juga akan kesulitan dari segi sumber daya karena harus menampung jutaan pengungsi. Oleh karena itu, UE bermaksud menjalin kerjasama, terutama dalam bentuk dana yang akan digunakan untuk pengungsi tersebut. Selain sokongan dana, pengawasan ketat di perbatasan akan membuat arus pengungsi (terutama migran gelap) diharapkan akan berkurang. UE tidak bermaksud untuk membuat Turki menjadi penampungan pengungsi, akan tetapi karena letak geografinya yang berbatasan langsung dengan Irak-Suriah tentu tidak mengherankan jika Turki menjadi pintu masuk utama pengungsi ke Eropa.

Bagi AA, melindungi agenda politik pemerintahan AKP menjadi tugas utamanya. Diawal laporan tersebut, disebutkan bahwa UE langsung memulai diskusi dengan AKP setelah *quick count* memihak kepada partai tersebut. Ini mengindikasikan bahwa UE memberi kepercayaan penuh kepada pemerintahan AKP yang cenderung meroket sejak awal dipegang oleh Erdogan. Sejak Erdogan memimpin, tingkat demokrasi Turki meningkat. Peran media juga menjadi sentral dalam menyebarkan informasi. Oleh karena itu, dengan adanya kerjasama tersebut, perlu adanya suatu *platform* penghubung antara kedua belah pihak. AA secara masif memberitakan setiap peristiwa selama pemilu. Hal tersebut semacam memberi sinyal kepada global bahwa pemerintahan AKP masih terus berlanjut. Sinyal tersebut dibaca oleh UE, dengan respon

untuk membuat kerjasama dengan blok 28 negara UE. Sebagai bagian akhirnya, terciptalah kerjasama UE-Turki tersebut. Ini merupakan contoh nyata dari penerapan teori *Media Diplomacy: Basic Communication Variant*, yaitu adanya media yang disponsori pemerintah berguna untuk mengirim sinyal kepada global. Sehingga menarik minat negara tertentu untuk menginisiasi kerjasama. Turki sangat mengandalkan AA selama pemilu berlangsung sampai dengan kerjasama UE-Turki terjalin. Karena sangat tidak memungkinkan jika Turki mengandalkan media lain. Tentunya UE juga mempertimbangkan liputan AA sebagai bahan untuk memulai diskusi tersebut. Oleh karena itu, penulis juga menyertakan sebagian poin kerjasama UE-Turki dari *website* resmi UE. Sebagai pertanda bahwa AA telah berhasil mengawal peristiwa pemilu dengan lancar sehingga menarik minat UE untuk memulai diskusi atau kerjasama.

3.2 Fokus AA dalam Isu-isu Tentang Islam

A. Rivalitas Media Barat dengan Turki Mendorong Sentimen Anti-Islam

Studi kasus pertama adalah ketika pemilu Turki Juli 2016, terjadi upaya kudeta yang dilakukan oleh kelompok Fethullah Gulen, yang juga mengerahkan pasukan militer untuk memuluskan misi kudeta tersebut. Sebanyak 200 orang lebih pembela demokrasi tewas melawan kudeta militer. Erdogan juga memenjarakan lebih dari 500 orang yang berkontribusi dalam kudeta tersebut. Namun, hal yang patut disorot adalah upaya pers Barat untuk membuat *framing media* yang buruk terhadap Turki secara khusus, dan menunjukkan ketidaksenangan terhadap negara Muslim secara umum. Dalam sebuah judul artikel BBC, terdapat kata “Erdogan: Presiden Turki yang Kejam”. Hal itu merujuk kepada upaya Erdogan memukul mundur para pengunjung rasa (yang merupakan

pendukung Gulen) beserta militernya dalam melakukan kudeta. Dari sudut pandang Turki, beberapa redaksi berita justru menganggap artikel-artikel tendensius Barat tersebut sebagai buah dari ketidaktahuan penulis. Secara keseluruhan pun, Barat seringkali menerbitkan berita-berita yang menyimpang terkait Turki, baik tentang Erdogan maupun kepemimpinannya (McConnell, 2016a).

Meskipun pemilu yang dilaksanakan pemerintah sangat menjunjung tinggi demokrasi, surat kabar maupun pengamat politik Barat yang menganut demokrasi justru mendukung kudeta tersebut. Pada saat kudeta tersebut gagal, narasi pers Barat berubah menjadi "Erdogan: Sang Diktator". Ditambah lagi dengan tuduhan bahwa Erdogan menggulingkan kudeta dengan otoritarianisme. Padahal, Erdogan dipilih secara demokratis. Sedangkan di media lain, rumor palsu telah dibuat oleh *The Daily Beast*, yang melaporkan bahwa Erdogan sedang melakukan perjalanan ke Jerman untuk mencari suaka. Padahal, disaat yang sama Erdogan kenyataannya sedang dalam perjalanan ke Istanbul. Dalam kasus ini, penting untuk melihat secara langsung liputan yang disiarkan oleh kanal Turki sendiri. Sikap Barat dalam menyiarkan kabar terkait Turki sesungguhnya merupakan pelanggaran berat terhadap etika jurnalistik. Perilaku tersebut hanya sedikit dari banyaknya masalah yang ditimbulkan pers Barat. Setidaknya dalam 50 tahun terakhir, Barat selalu kesulitan dalam memahami dunia Muslim. Prasangka Barat terkait Muslim sangat tercermin dari redaksi persnya. Mereka yang menulis tentang Turki kebanyakan kurang memiliki kompetensi yang mumpuni untuk tugas semacam itu. Dari sudut pandang orang Turki sendiri, pers Barat sudah tidak lagi menjadi konsumsi informasi mereka karena sikap negatif Barat yang kerap kali kekurangan informasi terhadap kepemimpinan politik Turki (McConnell, 2016b).

Sikap Barat dalam memberikan liputan terkait kudeta Turki yang bias tersebut termuat dalam artikel Enes Bayrakli. Dalam tulisannya beliau menggunakan teori Orientalisme Edward Said yang menganalisis keterlibatan Barat di Timur, yang sejak dulu dicirikan sebagai kubu yang sangat berbeda dan inferior, sehingga Barat perlu untuk mengintervensi setiap peristiwa yang ada di Timur. Barat memandang kudeta tersebut sebagai 'mendegradasi demokrasi Turki'. Sudah sejak lama Barat tidak menyukai pemerintahan Erdogan karena sekularisme yang semakin luntur, dan tentunya anggapan bahwa Barat adalah 'anti-Islam'. Dapat dilihat dari judul liputan medianya setelah kudeta yang dilakukan FETO gagal, dalam redaksinya terdapat narasi "Tuduhan penyiksaan terhadap tentara", dan "Turki melawan para jurnalis". Selain itu, Barat telah membuat berita palsu terkait keadaan darurat enam bulan yang dilakukan pemerintah pasca-kudeta tersebut. Padahal, pemerintah Turki hanya menjanjikan selamatnya tiga bulan masa keadaan darurat tersebut. Pemberitaan yang bias ini terjadi di sebagian besar liputan negara-negara Eropa Barat (Bayrakli, 2016a).

Mayoritas liputan Barat menyorot kudeta secara berlawanan dengan apa yang terjadi dilapangan. Bagi media Barat, bukan kekejaman militer dan *putschist* (orang yang merencanakan misi secara diam-diam untuk menggulingkan pemerintahan) yang menjadi fokus mereka, tetapi kekejaman pemerintah terhadap tentara. Pada kenyataannya, rakyat sipil Turki justru menunjukkan keberanian besar dalam memukul mundur militer dan *putschist* demi mempertahankan demokrasi dan supremasi hukum. Media barat juga menghasut orang-orang yang turun ke jalan sebagai Islamis radikal, pendukung setia Erdogan, dan bahkan simpatisan ISIL. Akibatnya, orang dapat mengklaim media barat mengabaikan pembunuhan warga sipil oleh para *putschist*. Hal

tersebut jelas mengindikasikan bahwa Barat justru berada pada pihak *putschist*. *The New York Times* bahkan men-*tweet* bahwa pendukung Erdogan layak domba. Setiap Erdogan memerintah sesuatu, rakyat sipil akan mengikutinya. Disisi lain, kudeta tersebut mengindikasikan bahwa upaya kudeta tidak selalu untuk misi menentang pemerintahan yang lalim, melainkan sebagai ancaman terhadap pemerintahan yang sah dari kelompok kecil. Sangat mengejutkan bahwa Gulen yang dicurigai dari awal sebagai otak dibalik kudeta tersebut justru tidak terekspos media Barat. Padahal media Turki telah mengirim sinyal kepada publik tentang keterlibatan Gulen. Ini menunjukkan bahwa konsentrasi media Barat justru tidak tertuju pada kudeta tersebut, melainkan kepada kebenciannya terhadap Erdogan dan pemerintahannya, dan membuat teori konspirasi seolah-olah kudeta tersebut justru diinisiasi oleh Erdogan sendiri dengan tujuan untuk memperluas kekuasaannya (Bayrakli, 2016b).

Tidak bisa dipungkiri, bahwa Barat terlihat begitu sentimen terhadap Dunia Islam. Negara-negara kawasan Timur Tengah kerap kali menjadi sasaran *framing media* Barat. Tujuannya tentu untuk mendegradasikan posisi negara-negara tersebut dalam ranah politik internasional. Disamping itu, Barat yang menjadi pelopor media internasional memiliki posisi yang menguntungkan. Dimana ia menjadi yang pertama dalam merintis penggunaan media terutama dekade 1980an hingga 1990an. Dalam hal ini kebangkitan dunia Islam dapat diwakili oleh Turki yang secara konsisten mencerminkan kemakmuran rakyatnya dalam berbagai aspek. Seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hingga teknologi. Tidak mengherankan jika pengaruh Turki diluar kawasannya tentu akan membuat Barat berupaya mencegahnya. Orientasi media yang mewakili dunia Islam seperti AA tentu tidak akan sekejam media Barat dalam mengemas

redaksinya. Kehadiran media dari negara Muslim, terutama AA akan menjadi penyeimbang bagi masyarakat internasional dalam hal konsumsi informasi. Disaat media Barat kerap kali memutarbalikan fakta di lapangan, media seperti AA berupaya menangkis pemberitaan buruk tersebut dengan menyediakan informasi ataupun liputan secara langsung di lapangan, dan tentunya dengan narasumber yang kompeten untuk tugas seperti itu. Kemajuan Turki dan medianya sebagai delegasi Islam terlihat tidak se-radikal pemberitaan Barat. Hal ini mengindikasikan bahwa negara Muslim tidak akan mengambil langkah untuk menciptakan hegemoni yang realis seperti yang dilakukan Barat. Semuanya tergambar dari redaksi yang ditulis media Barat, seperti contoh diatas juga yang mengandung unsur propaganda.

Dari studi kasus diatas, tergambar jelas bahwa media Islam sangat diperlukan untuk meluruskan pemikiran pembaca berita yang sangat mungkin termakan *framing media* Barat. Dalam hal ini, AA membuktikan bahwa ia mampu menjadi penyeimbang utama dalam isu Turki dan Islam. Dengan jaminan bahwa liputan-liputan yang disajikannya berasal dari sumber utama permasalahan, itu bisa menjadi senjata untuk menyeimbangkan kabar miring yang beredar. Oleh karena itu, AA sangat memprioritaskan untuk menyediakan informasi berdasarkan sumber dari pemerintahan Turki sendiri. Sehingga memungkinkan pembaca untuk memahami konteks Turki dari perspektif sumber utama. Hal ini sesuai dengan teori *Media Diplomacy* variabel pertama: *Basic Communication Variant*. Didalamnya terdapat argumen bahwa “Media yang disponsori negara memiliki tanggung jawab dalam mengirim balik sinyal kepada negara lain terkait kebijakan yang diambil negara asal. Sehingga memungkinkannya untuk menjadi perantara yang bisa diandalkan”. Tugas ini dapat dijalankan dengan baik

oleh AA. Dalam studi kasus diatas, salah satu kabar yang dibantah dengan tegas adalah pemberitaan Barat yang menyatakan bahwa Erdogan sedang terbang mencari suaka ke Jerman. Padahal disaat yang sama Erdogan sedang dalam perjalanan ke Istanbul. Dalam hal ini, AA dapat menjalankan apa yang disebut dalam teori *Media Diplomacy* yaitu *travelling diplomacy*, yaitu sebuah kondisi dimana media memberitakan suatu peristiwa secara langsung ketika narasumber yang dituju sedang dalam perjalanan menggunakan transportasi tertentu. Hal ini tentunya akan semakin menguatkan liputan dari sudut pandang pembaca karena redaksinya tidak melewati proses *framing* tertentu.

B. Negara Islam Timur Tengah Tanpa Dominasi Amerika Serikat

Studi Kasus Kedua yaitu pada tahun 2017, ketika Presiden AS Barack Obama diujung masa pemerintahannya, banyak aktor global yang meragukan keberadaan AS di Timur Tengah. Namun faktanya Obama jauh lebih banyak terlibat dalam politik Timur Tengah daripada presiden AS sebelumnya. Diakhir masa jabatannya ini, dunia mampu menilai kontribusi Obama yang kala itu sangat condong kepada Syiah Iran, dan memalingkan dukungan dari Sunni yang lebih tradisional. Sebagai contoh, pada tahun 2009 ketika masyarakat Iran turun ke jalan memprotes hasil pemilihan, Washington justru tidak menunjukkan dukungan terhadap demokrasi Iran yang digaungkan oleh masyarakatnya. Dan mengirimkan sinyal kepada Teheran mengenai netralitasnya terhadap masalah tersebut, seolah-olah ingin merebut hati para pemimpin Iran sebagai mitra regional strategis masa depan AS. Didalam kasus Suriah, Iran dan AS yang bermitra sama-sama ingin menguasai wilayah tersebut. Berbagai gencatan senjata dilakukan untuk memukul mundur unjuk rasa masyarakat Suriah yang memprotes Bashar al-

Assad. AS sebagai mitra tidak menunjukkan dukungah penuh terhadap masyarakat Suriah, dengan hanya meminta Assad 'keluar dari jalur' reformasi, dan tidak memaksa diri untuk mengatakan bahwa Assad harus turun. Pola Obama juga telah di deteksi di Turki, mengingat Washington justru dengan cepat menyatakan berteman dengan Kurdi Irak dan Suriah, yang mana digolongkan sebagai musuh oleh Ankara. Dari sini, sudah semakin jelas bahwa AS telah meninggalkan sekutu Sunni di Timur Tengah (Hussain, 2017a).

Kemudian, ketika Obama digantikan oleh Presiden baru, yaitu Donald Trump, perlahan pengaruh AS di Timur Tengah mulai menghilang. Kerjasama yang dibangun Obama dengan Iran kemudian runtuh dibawah kepemimpinan Trump. Ini menjadi kehadiran yang paling minim dari AS di Timur Tengah sejak 1956. Tentu Timur Tengah akan mengalami perubahan peta politik yang cukup besar, dan Iran menjadi negara pertama yang mengisi kesenjangan pasca-Amerika tersebut, dengan Rusia di urutan kedua. Kedua negara tersebut sekilas seperti mitra, namun aliansi tersebut melemah ketika tersiar kabar pembom Rusia yang lepas landas dari pangkalan udara Iran untuk pengeboman di Suriah justru di respon Iran dengan upaya penghentian pemboman tersebut. Keduanya negara tersebut sesungguhnya sedang memperebutkan peran utama di Suriah. Iran sendiri semasa Obama memimpin telah diberi miliaran dollar oleh Washington sebagai hadiah untuk ratifikasi perjanjian nuklir Teheran. AS tentu mengharapkan Iran mampu memukul balik kelompok-kelompok Sunni namun dilapangan justru Iran beberapa kali dipukul mundur sehingga kesulitan untuk mendapatkan kembali wilayah (Hussain, 2017b).

Disisi lain, Rusia yang sedari awal meragukan Iran sebagai mitra, justru didatangi oleh komandan milisi Iran, Qassem Soleimani yang mengharapkan bantuan Rusia. Iran akan menjanjikan hasil yang memuaskan jika Rusia menawarkan perlindungan udara untuk menyerang kelompok Sunni. Namun, permasalahan utamanya adalah keengganan Iran untuk berbagi wilayah kekuasaan. Iran ingin menguasai Suriah bersama dengan Rusia. Hanya saja kendali Suriah akan sepenuhnya milik Teheran, hal yang membuat Rusia heran, dan tentunya menahan diri untuk memberi bantuan udara kepada Iran. Moskow tampak tidak terima dengan upaya negosiasi tersebut. Disisi lain, sebagai akibatnya setiap kali Rusia ingin melepaskan gencatan senjata, baik bersama AS maupun Turki, Iran ingin gencatan tersebut gagal dengan upayanya menahan gencatan senjata tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa Iran ingin dianggap sebagai penguasa di Suriah. Dengan melemahnya aliansi Rusia-Iran, serta persahabatan Turki-AS yang berakhir seiring pergantian Presiden ke Trump. Maka peta persaingan perebutan wilayah di Suriah akan banyak berubah (Hussain, 2017c).

Ketika Turki berupaya untuk mengerahkan pasukannya ke Suriah, Ankara dihadapkan langsung dengan aliansi Rusia-Iran yang melemah. Dengan lepasnya persahabatan dengan Washington, tentu Ankara akan mencari aliansi baru, dan dalam hal ini, Ankara berhasil menggandeng Moskow, yang sudah tidak bisa mengandalkan Teheran sebagai mitra yang dapat dipercaya. Ketika persahabatan Rusia dan Turki meningkat, maka aliansi Rusia-Iran dan Turki-AS benar-benar hilang, dan ini akan mendefinisikan ulang kondisi Timur Tengah pasca AS. Disatu sisi, AS dibawah komando Trump diperkirakan akan muncul sebagai teman dalam aliansi Rusia-Turki, dan musuh besar Iran. Kondisi ini membuat Iran semakin tersisih dalam perebutan wilayah Suriah.

Sebab, Iran tak lagi memiliki sekutu yang benar-benar mumpuni dan sarat akan kepentingan di Suriah. Terutama setelah Panglima militer mereka, Jendral Qassem Soleimani, ditembak *drone* AS hingga tewas. Itu juga merupakan sinyal kuat bahwa AS akan selalu menargetkan Iran sebagai musuh besarnya (Hussain, 2017d).

Dalam sebuah artikel karya Gauvin, memaparkan perbedaan mendasar antara pemerintahan Obama dan Trump dalam keterlibatannya di Timur Tengah. Dari keduanya, sangat terlihat bahwa kebijakannya jauh berbeda, dan sangat berseberangan. Menurut Gauvin, orientasi Obama cenderung menginginkan demokratisasi di Kawasan Timur Tengah. Segala upaya dilakukan untuk menggulingkan pemerintahan seperti: Afghanistan, Mesir, Irak, Libya, Suriah, dan Yaman. Semuanya hampir berakhir sama, kondisi negara yang semakin berkecamuk. Kecuali Mesir, yang terhalang kediktatoran militernya. Pemerintahan AS era Obama menyadari bahwa salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk membuat Timur Tengah tidak bergejolak lagi adalah dengan cara demokratisasi. Selain sebagai contoh negara demokrasi yang besar, Obama mungkin telah berandai-andai jika Timur Tengah menjadi kawasan yang terdemokratisasi, maka kontrol AS dikawasan tersebut akan semakin kuat. Dengan kata lain, Obama memiliki kecenderungan pendekatan *soft-power* terhadap Timur Tengah. Sedangkan, kebijakan AS era Trump berbanding terbalik. Trump memilih pendekatan yang lebih realis untuk membuat AS menjadi hegemoni di kawasan tersebut. Diantaranya yang paling kontroversial adalah menegosiasikan kembali kesepakatan nuklir Iran, yang akan membentuk masa depan dinamika keamanan yang bergejolak. Bahkan, bila diperlukan, Trump akan mengambil tindakan militer dengan mengerahkan pasukan AS demi mencapai tujuan tersebut (Gauvin, 2016).

Pada kasus tersebut, hal yang paling disorot adalah masa depan Timur Tengah ketika Trump memimpin. Bisa dikatakan bahwa Trump memiliki sentimen anti-Islam yang tinggi, terlebih kepada Iran. Namun, dalam liputan tersebut setidaknya menggambarkan bahwa Timur Tengah sudah siap jika AS tidak menjadikan kawasan tersebut sebagai fokus dalam kebijakan luar negerinya. Hal itu disebabkan karena Turki memiliki aliansi baru yaitu Rusia. Banyak yang beranggapan jika aliansi Turki-AS berakhir karena faktor Trump. Tidak bisa dipungkiri bahwa Trump bukanlah orang yang disukai Erdogan. Oleh karena itu, Turki melalui liputan AA tersebut secara eksplisit mengumumkan tentang aliansi barunya bersama Rusia. Dalam liputan tersebut, tertulis bahwa perlahan AS akan masuk kedalam aliansi Turki-Rusia. Itu dapat disimpulkan bahwa AS tidak mau meninggalkan kawasan tersebut secara utuh. Kepentingannya di Suriah harus tetap dipertahankan dengan atau tanpa Turki maupun Iran. Disisi lain, liputan tersebut mengindikasikan bahwa keterlibatan AS yang semakin minim akan membuat pengaruh Turki dikawasan Timur Tengah semakin besar. Sinyal seperti inilah yang dibutuhkan Turki untuk lebih tidak bergantung dengan AS. Lewat liputan tentang keinginan Iran supaya gencatan senjata Rusia di Suriah gagal, maka Rusia akan memaksa diri untuk menciptakan aliansi baru yaitu dengan Turki. Sinyal yang dikirim AA lewat liputannya tersebut sangat relevan dengan konsep *Media Diplomacy: Basic Communication Variant*. Terbukti dari sejak AS dipimpin Trump, Turki menarik diri bersekutu dengan Washington. Disatu sisi, ketika liputan AA tentang Iran yang setengah hati bekerjasama dengan Rusia terbit, membuat Turki melihat peluang aliansi tersebut.

C. Upaya Turki Mengawal Isu Sentimen Anti-Islam di Austria

Studi Kasus Ketiga terjadi pada Agustus 2018, ketika Badan Keamanan Kemendagri Austria mengakhiri kerjasamanya dengan komunitas agama Islam di negara tersebut, dan berpaling kepada Partai OVP, yang bisa dikenal sebagai partai konservatif sayap kanan untuk mengadopsi kebijakan dalam rangka mengkriminalisasi aktor Islam. Bisa dikatakan bahwa ide ini adalah awal mula kondisi Muslim di Austria mengalami diskriminasi. Padahal sebelumnya Austria juga dikenal dengan penduduk Muslimnya yang cukup banyak, dan juga sangat terbuka serta semakin akomodatif terhadap berbagai agenda komunitas Muslim, bahkan dalam aspek kehidupan. Muslim di negara tersebut sangat aman untuk tinggal. Itu semua terjadi sebelum OVP yang dipimpin oleh Sebastian Kurz melakukan berbagai propaganda anti-Muslim. OVP merupakan partai yang menguasai pemerintahan Austria sebelum pemerintahan van der Bellen dari Partai Hijau. Pada saat pemerintahan OVP, banyak UU dan inisiatif baru yang menyasar umat muslim, seperti larangan hijab di taman kanak-kanak dan sekolah dasar, atau upaya menutup masjid (Hafez, 2019a).

Semasa pemerintahan Bellen integrasi pemerintah dan Komunitas Muslim Austria sangat baik. Seluruh agenda Komunitas Muslim didukung pemerintah dan aparat keamanan. Sebelumnya tidak ada retorika terkait pola anti-Muslim, dan menganggap Komunitas Muslim Austria (IGGO) sebagai mitra dalam memerangi ekstremisme dan Jihadisme. Dengan adanya koalisi pemerintah dengan partai sayap kanan, IGGO kemudian mulai digambarkan sebagai 'Islam yang berbahaya', dan tidak lagi menganggap sebagai 'teman Muslim'. Padahal, IGGO telah berjasa banyak dalam pembangunan pendidikan agama di sekolah-sekolah, walaupun pembangunan tersebut didanai penuh oleh negara. Kini, sekolah-sekolah tersebut ditempatkan dalam lingkup

kegiatan-kegiatan Islam yang dianggap berbahaya. Karena menjadi tempat pertama pembentukan ideologi yang dianggap berbahaya oleh sayap kanan. Hal tersebut didasari oleh anggapan bahwa kaum Islamis akan menggunakan pendidikan, layanan kesehatan, dan organisasi budaya untuk menciptakan apa yang disebut dengan 'masyarakat tandingan', yang akan mengancam keamanan negara. Kondisi tersebut direspon oleh sebagian Muslim di beberapa negara, salah satunya yang disampaikan oleh Omer Celik, Menteri UE Turki, yang menyatakan kecaman terhadap Kurz bahwa Kanselir Austria tersebut sejatinya merupakan perwakilan dari Islamophobia dan rasisme (Hafez, 2019b).

Pergesaran paradigma tersebut membuat pemerintah sayap kanan semakin menegaskan kembali agenda politiknya untuk membatasi umat Muslim di negara tersebut. Pada 2021 muncul gagasan "*Islam Map*" yang kemudian disahkan menjadi kebijakan secara resmi oleh pemerintah Austria. Kebijakan tersebut merupakan pemetaan terhadap lokasi-lokasi umat Muslim dalam menjalani aktivitas di beberapa lingkungan yang mencakup 620 lokasi di seluruh negeri yang terdiri dari masjid, kantor organisasi, dan kantor pejabat Muslim. Lokasi-lokasi tersebut dapat diakses di web oleh pemerintah. Tujuan utamanya tentu untuk memantau organisasi dan individu Muslim untuk menyelidiki orientasi agama dan politik mereka (Nia, 2021). Kebijakan kontroversial tersebut tentunya menuai kecaman, dan yang paling utama adalah dari umat Muslim. IGGO sebagai organisasi Muslim besar Austria mengecam bahwa kebijakan tersebut akan menstigmatisasi Muslim Austria sebagai kelompok yang berpotensi membahayakan bagi masyarakat dan tatanan hukum negara demokrasi tersebut. Padahal selama ini kontribusi Muslim Austria cukup besar. Itu menempatkan

kaum Muslim dalam pengintaian yang lebih intens oleh pemerintah. Ditegaskan oleh Kurz, bahwa ia sangat anti terhadap politik Islam. Oleh karenanya, kebijakan tersebut dibuat bukan dengan tujuan melawan agama, akan tetapi melawan ideologi politik. Namun, IGGO dengan tegas akan mengajukan gugatan ke pengadilan dengan alasan hak asasi kemanusiaan yang dilanggar oleh pemerintah, dan sebagai tuduhan yang tidak berdasar, serta melanggar kesepakatan terkait agama Islam yang diakui pemerintah sejak tahun 1912 ketika masa monarki Habsburg (Hafez F. , 2019a).

Disebutkan oleh Farid Hafez, agenda kerjasama pemerintah dengan Sayap Kanan akan berimplikasi besar pada dana yang dialokasikan pemerintah untuk IGGO berkaitan dengan agendanya yaitu pendidikan agama, pelatihan guru agama, dan organisasi kerohanian di penjara dan rumah sakit. Dengan mengkriminalisasi IGGO, maka semua lembaga-lembaga yang dinaungi IGGO yang secara hukum telah terhubung satu sama lain sejak UU Islam 2015 akan menjadi sasaran. Hal ini akan memungkinkan IGGO dan lembaga-lembaga kecilnya terjun kedalam *divide et impera*, sehingga menciptakan gesekan didalam IGGO yang kemudian akan membuatnya menjadi institusi kecil yang tidak memiliki dampak signifikan. Disisi lain, kebijakan 'Islam Map' yang telah diluncurkan Mei 2021 jika ditelusuri memiliki akar sejak September 2019. Kala itu OVP mengumumkan serangkaian tindakan untuk melarang apa yang mereka sebut dengan 'politik islam'. Secara khusus, OVP telah membuat UU baru khusus untuk melarang 'politik islam' tersebut yaitu dengan menciptakan pusat pemantauan yang ditujukan untuk mengawasi 'politik islam' (agenda yang sudah sejak awal diumumkan oleh OVP dan FPO). Jika dilihat dengan gambaran yang lebih luas, apa yang dilakukan pemerintahan FPO bersama OVP merupakan tindakan otoritarianisme terhadap

organisasi agama, yang dapat menjadi preseden bagi negara-negara bangsa untuk menerapkan hal yang serupa. Institusi agama dan oposisi politik perlu untuk berkolaborasi dengan IGGO agar tidak membiarkan lagi kriminalisasi institusi utama Muslim di Austria menjadi hal yang biasa (Hafez F. , 2019b).

Sebagai negara Muslim, Turki angkat bicara terkait kebijakan pemerintah Austria tersebut. Dalam sebuah laporan AA, pemerintah Turki dengan tegas mengecam tindakan tersebut. Turki mendesak agar pemerintah Austria berhenti menargetkan komunitas islam Austria sebagai kelompok yang dianggap masyarakat tandingan. Hal itu akan merusak kohesi dan partisipasi sosial, mengingat jasa-jasa IGGO kepada Austria yang sangat banyak. Solidaritas Turki kepada IGGO terlihat nyata dalam peristiwa tersebut. Ini dibuktikan dari banyak liputan AA sejak Agustus 2019 sampai terbentuknya kebijakan Islam Map tersebut pada Mei 2021. Sejak awal kecurigaan pemerintah Turki terhadap Partai Sayap Kanan telah ada dan tentunya membuat kekhawatiran akan masa depan Muslim disana. Sebagai media yang mewakili negara Muslim, AA bisa dikatakan konsisten dalam memberikan liputan terkait perkembangan pemerintahan Austria dan wacana anti-Islamnya. Hal ini sangat diperlukan pemerintah Turki karena sejak awal pembaharuan sistem AA sangat berorientasi pada nilai keislaman. Sehingga dengan banyaknya pemberitaan tersebut diharapkan dapat memberikan tekanan kepada pemerintah Austria. Namun, yang ditakutkan Turki terjadi. Sehingga membuat hubungan Turki-Austria dalam konteks ini memburuk.

Walaupun AA telah melakukan apa yang disebut dalam teori *Media Diplomacy: Basic Communication Variant*, setidaknya AA telah mewakili narasi pemerintahan Turki.

Jika melihat apa yang dilakukan AA sejak Agustus 2019, sangat besar kemungkinan kebijakan-kebijakan Sayap Kanan Austria akan disorot terus-menerus oleh pemerintah Turki. Sebab, tidak diragukan lagi bahwa Turki sangat gencar dan masif dalam memberikan dukungannya terhadap negara maupun komunitas Muslim di dunia. Khususnya di Austria, Turki mengkategorikan IGGO sebagai *voiceless actor*. Sebab, komunitas Muslim tersebut sejatinya telah dicurangi oleh pemerintah Austria. Padahal yang terjadi, Muslim tidak pernah melakukan tindak kriminal maupun sesuatu yang melawan pemerintah. Akan tetapi karena sentimen anti-Islam yang sangat besar, membuat IGGO tidak bisa melakukan banyak hal. Gugatan ke pengadilan Austria pun dipatahkan oleh pemerintah dengan dalih bahwa kebijakan tersebut hanya untuk pemetaan warga negara saja, dan tidak bermaksud untuk menempatkan Muslim dibawah kecurigaan. Namun, pemerintah Turki membaca kepentingan lain dari kebijakan tersebut. Terlebih, itu semua dilatarbelakangi oleh Sayap Kanan. Disisi lain, AA telah melakukan tugasnya dengan baik yaitu mengawal kebijakan pemerintah Austria dengan liputan-liputannya. Turki pun memahami bahwa hanya AA media yang paling relevan dalam mampu mengakomodasi narasinya tersebut.

3.3 Fokus AA dalam Isu-isu Kemanusiaan

A. Pembunuhan Misterius Terhadap Jamal Khashoggi

Studi kasus pertama adalah pembunuhan misterius terhadap jurnalis Arab Saudi, Jamal Khashoggi yang terjadi di kantor Konsulat Saudi Arabia di Turki pada Oktober 2018. Kala itu Khashoggi hendak mengurus surat perihal pernikahannya dengan calon istrinya yang berasal dari Turki, Hatice Cengiz. Namun ketika Khashoggi memasuki

kantor konsulat tersebut, ia telah ditemukan tewas secara mengerikan dengan kondisi badannya termutilasi. Kuat dugaan bahwa kematian kontroversial tersebut berkaitan erat dengan kerajaan Arab Saudi. Khashoggi sendiri dikenal sebagai jurnalis yang sangat vokal dalam menyuarakan kritikan kerasnya terhadap kepemimpinan Raja Salman. Namun, dugaan tersebut ditangkis oleh Kerajaan Saudi dengan mengatakan bahwa pihaknya sama sekali tidak pernah mengirim pembunuh bayaran untuk membunuh Khashoggi. Sementara itu, dari pihak Turki yang diwakili Erdogan memberikan tanggapan dengan berjanji akan menjelaskan motif pembunuhan terhadap Khashoggi tersebut. Turki sadar kasus ini sangat sensitif, terutama berkaitan dengan Arab Saudi yang merupakan sekutu baiknya. Erdogan menyatakan bahwa dirinya tidak bisa secara langsung menggugat Arab Saudi atas pembunuhan tersebut (Onum, 2019).

Meskipun Turki dan Saudi bersekutu, tanggapan Turki terkait pembunuhan tersebut sangat jelas dan tegas, yaitu didasarkan pada sistem peradilan internasional yang harus ditegakkan. Erdogan juga menjelaskan bahwa Turki akan menolak untuk membiarkan kasus ini berlalu begitu saja, dan menganggap ini salah satu perselisihan bilateral antara Turki-Saudi. Hubungan yang baik tidak akan menghalangi keadilan untuk tegak. Meskipun keduanya merupakan sekutu, tentu tidak akan ragu berbicara kebenaran yang pahit. Dengan komitmennya menegakkan keadilan, Turki memilih untuk menyerahkan kasus tersebut kepada PBB untuk mencari laporan-laporan yang dapat membuktikan pembunuhan tersebut. Disisi lain, banyak masyarakat internasional yang menyalahkan Turki terkait paspor pembunuh yang diizinkan masuk ke Istanbul. Menanggapi anggapan tersebut, Erdogan merespons dengan menyatakan kecaman terhadap pembunuh yang sekaligus mengklarifikasi bahwa paspor yang digunakan

adalah paspor diplomatik. Sementara itu, PBB mendapatkan laporan terkait pembunuhan Khashoggi. Agnes Callamard, pelapor khusus PBB dalam investigasi internasional melaporkan bahwa pembunuhan Khashoggi dilakukan oleh pejabat Arab Saudi. Callamard juga menambahkan bahwa upaya Turki untuk melakukan penyelidikan dengan cepat, efektif, independen dan transparan sesuai dengan hukum internasional, telah secara nyata dihalangi oleh Arab Saudi. Saat ini, kasus tersebut masih belum kunjung terselesaikan. Banyak negara yang memprotes, serta tidak puas dengan penyelesaian kasus tersebut. Persidangan terhadap tersangka pembunuhan pun dilakukan secara tertutup oleh Arab Saudi (Rufinaldo, 2019).

Dalam sebuah artikel karya Ismail Numan Telci, pembunuhan Jamal Khashoggi diulas dengan menitikberatkan kepada Turki sebagai negara yang menjadi tempat kejadian perkara tersebut. Turki menjadi negara yang memimpin komunitas internasional untuk mendesak PBB akan menyelesaikan perkara tersebut. Sejak insiden tersebut, Ankara dianggap sebagai tempat pelarian yang aman oleh para pengungsi, imigran, maupun pembangkang, dan itu terbukti dengan pembunuhan Khashoggi. Hal itu akan merusak citra global terhadap Ankara. Namun, Turki sangat berhati-hati dalam hubungannya dengan Arab Saudi. Bahkan, Turki justru menghindari berhadapan langsung dengan Arab Saudi agar tidak terjadi rivalitas. Selain itu juga demi hubungan bilateral yang tetap terjaga dan mempertimbangkan posisi vital Arab Saudi dalam keseimbangan kawasan Timur Tengah. Turki ingin membawa para pelaku ke pengadilan Turki, akan tetapi disisi lain juga harus tetap menjaga hubungan bilateral dengan Arab Saudi. Oleh karena itu, Turki ingin bermaksud untuk membagi tugas dengan Arab Saudi dan PBB untuk melaksanakan penyelidikan internasional (Telci, 2018a).

Demi terciptanya suasana kondusif secara global, Turki dan Arab Saudi bekerja sama dengan maju sebagai pemimpin dalam persidangan terhadap tersangka pembunuhan, dan Turki juga mengizinkan jaksa agung Arab Saudi untuk membantu persidangan tersebut. Disatu momen, Erdogan menuliskan artikel yang mengonfirmasi pembunuh Khashoggi adalah politisi tingkat atas kerajaan Saudi. Pesan tersebut seolah mengindikasikan bahwa Ankara ingin menekankan kepada Arab Saudi untuk mengambil tindakan tanggung jawab sebagai pemimpin dalam permasalahan tersebut. Disisi lain, AS memutuskan untuk terlibat dalam permasalahan tersebut, mengingat Khashoggi merupakan kolumnis *Washington Post*. Jasa-jasa Khashoggi begitu banyak terhadap surat kabar tersebut, dan dia sangat dihormati di ranah media dan kalangan akademisi Barat, khususnya AS. Dorongan dari media Barat juga membuat Trump memutuskan untuk ikut andil. Arab Saudi dikenal merupakan sekutu dekat AS di Timur Tengah, yang juga menempatkannya sebagai sentral strategi AS di kawasan tersebut. AS melalui Menlu Mike Pompeo memperingatkan putra mahkota bin Salman terkait masa depannya sebagai raja, yang menyinggung bahwa jika dia gagal menangani kasus ini, maka kerajaan dalam keadaan bahaya (Telci, 2018b).

Situasi tersebut berdampak terhadap kondisi politik Arab Saudi. Di lingkaran politik dan media Arab, menyorot kerajaan yang mengaku tidak mengetahui apapun tentang pembunuhan tersebut. Bahkan pernyataan keluar dari kerajaan bahwa pembunuhan tersebut didalangi oleh pembunuh yang berafiliasi dengan intelijen Suriah. Pernyataan tersebut dianggap sebagai upaya memalingkan kesalahan dari pemerintahan Riyadh. Dampak politik yang paling terasa adalah ancaman pemecatan Putra Mahkota bin Salman dari jabatannya. Meskipun Raja Salman nampak berat untuk

melakukannya, dukungan dari komunitas internasional untuk pemecatan tersebut kian menggema. Selain itu, kalangan politisi dan opini publik Barat juga mengamati peran Putra Mahkota dengan menuntut hukuman terhadap pembunuh sebenarnya Khashoggi. Akibat dari desakan tersebut, terjadi pertikaian antara AS-Saudi. Setelah Arab Saudi mengumumkan kematian Khashoggi, terjadilah semacam *psywar* antara AS-Saudi. Dari pihak AS melalui Trump menyatakan bahwa jika Saudi terbukti bersalah dalam kasus tersebut, Trump tidak akan ragu memberikan 'konsekuensi berat' kepada Saudi. Pernyataan tersebut dapat ditafsirkan bahwa AS tidak akan melangkah lebih jauh untuk membela Pangeran bin Salman. Disisi lain, pernyataan Trump tidak membuat Saudi sedikitpun gentar. Melalui surat kabar *Al-Arabiya News Channel*, dituliskan bahwa kemungkinan sanksi yang akan diberlakukan AS kepada Saudi justru akan membuat 'Washington menikam dirinya sendiri', sebuah serangan balik dengan maksud memperingatkan dan mengancam pemerintahan Trump (Telci, 2018c).

Dalam studi kasus tersebut, peran media sangat berpengaruh untuk para aktor dalam menentukan kebijakannya. AA secara tidak langsung menjadi perantara diplomasi yang kuat dengan Saudi. Setelah kabar kematian Khashoggi, Erdogan secara langsung turun tangan untuk menyikapi desakan komunitas internasional yang meminta perkara tersebut diulas tuntas. Akan tetapi, karena pembunuhan tersebut terikat erat dengan sekutu baiknya, yaitu Saudi, maka Turki berupaya untuk tidak membuat klaim sepihak dengan menuduh Saudi yang berada dibalik pembunuhan tersebut. Itu semua akan membahayakan hubungan bilateral kedua negara. Oleh karena itu, Turki memberikan semacam 'dorongan halus' kepada Saudi untuk mengambil tindakan tanggung jawab terkait jurnalisnya tersebut. Dorongan halus itu berupa sinyal yang

dikirim media yaitu “Kerajaan Saudi harus mau untuk memimpin persidangan dengan Turki”. Ditambahkan juga dalam redaksinya bahwa Turki akan membawa juga kasus ini ke peradilan internasional dan PBB untuk menggaet simpatisan lain. Dalam hal ini, Turki seolah ingin memberi sinyal kepada orang Barat (yang banyak mengisi pos jabatan di PBB) untuk mengambil langkah konkret sehingga tekanan kepada Saudi semakin tinggi.

Sinyal yang dikirimkan Turki melalui AA memberi dampak signifikan terhadap penyelesaian masalah tersebut. PBB melalui tim investigasinya yang diwakili oleh Agnes Callamard berhasil menemukan dokumen-dokumen pendukung yang menerangkan bahwa pembunuhan tersebut diinisiasi oleh pejabat Saudi. Dengan begitu, Saudi akan lebih gencar dalam memimpin permasalahan tersebut. Dampak lain yang cukup signifikan adalah kemarahan AS terhadap Saudi. Trump yang dikenal sangat pragmatis, tidak ragu-ragu untuk mendesak senator AS maju sebagai pemimpin persidangan dengan dasar UU Magnitsky. Itu membuat situasi politik Saudi cukup panas. Pasalnya, Menlu AS Mike Pompeo dengan berani menyatakan bahwa jabatan Putra Mahkota Kerajaan Saudi sedang dalam ancaman jika tidak mampu menyelesaikan masalah ini. Dengan sinyal yang dikirimkan AA tersebut, tentunya membuat tugas Turki tidak akan terlalu rumit karena harus berhadapan langsung dengan Saudi. Walaupun Turki tidak menjadi sekutu dekat AS, setidaknya hubungan erat Khashoggi yang menjadi kolumnis *Washington Post* dapat mengembalikan lagi citra baik Ankara yang telah dituduh sebagai kota pelarian bagi pembangkang.

Kekuatan AA dalam mengirimkan sinyal tersebut membuat tugas diplomasi pemerintah Turki semakin mudah. Hal itu akan mendorong bentuk diplomasi yang

sebelumnya cenderung konvensional menjadi lebih mudah karena akses informasi cepat yang dikirim media. Hal ini akan menjadi jalur diplomasi yang menjanjikan antara Turki dan Saudi. Karena dua negara tersebut menjadi aktor penting di kawasan Timur Tengah. Sehingga membutuhkan pendekatan *soft-power* apabila terjadi suatu permasalahan yang sifatnya saling berhadapan. Turki memang tidak merencanakan suatu diplomasi yang pragmatis seperti yang dilakukan oleh Trump. Justru dengan kehadiran AA dapat mencerminkan karakteristik diplomasi Turki dengan sesama negara muslim. Jika dihubungkan dengan teori *Media Diplomacy: Basic Communication Variant*, apa yang dilakukan AA dalam kasus Khashoggi ini sangat relevan. Dalam hal ini, Turki membutuhkan suatu perantara dalam rangka mengirim sinyal kepada global untuk mengambil tindakan atas pembunuhan Khashoggi. AA melakukan tugas tersebut dengan tepat sehingga mampu mengundang komunitas internasional maupun institusi global semacam PBB untuk melakukan investigasi. Sehingga membuat Turki menghindari secara langsung potensi pertikaian dengan Saudi. AA juga dianggap sebagai media paling tepat dalam tugas ini, karena lokasi pembunuhan yang berada di Istanbul. Membuatnya menjadi media yang paling ditunggu karena perspektif yang dimuat dalam redaksinya berasal dari negara asalnya.

B. Solidaritas Turki-Bangladesh dalam Krisis Rohingya

Studi Kasus Kedua adalah pada tahun 2017, ketika kekerasan militer Myanmar terhadap penduduk Rohingya telah menjadi salah satu isu kemanusiaan yang paling sering dibicarakan. Konflik dengan latar belakang etnis dan agama tersebut menjadi sangat kompleks. Pemerintahan dibawah kendali Aung San Suu Kyi tentunya menjadi

aktor yang disalahkan terkait konflik tersebut. Situasi Rohingya yang mengerikan dan sarat kompleksitas digambarkan oleh PBB sebagai etnis minoritas yang paling teraniaya dan tidak bersahabat di dunia. Dalam konflik tersebut, etnis Rohingya yang memeluk agama Islam dipaksa untuk mengkonversikan agamanya oleh pemerintah. Disisi lain, para etnis Rohingya tetap kukuh dalam memeluk agamanya, walaupun ancaman penyiksaan dan berbagai kekerasan dialami setiap hari. Meskipun konflik Rohingya sudah terjadi sejak 1970an, namun kekerasan mulai meningkat sejak 2012 hingga 2017. Banyak hak Rohingya yang dirampas oleh pemerintah, diantaranya adalah pencabutan hak pilih, dan yang paling parah adalah diberlakukannya UU kesehatan dan kontrol populasi, yang mengharuskan wanita menunggu tiga tahun sebelum memiliki anak lagi. Hal ini jelas bertujuan untuk mengontrol populasi di kalangan Rohingya. Ironisnya, Aung San Suu Kyi, yang pernah mendapatkan nobel perdamaian pada 1991 berkat kontribusinya memajukan demokrasi Myanmar tanpa kekerasan, justru menjadi salah satu orang yang paling bertanggung jawab terkait konflik atas nama kemanusiaan tersebut. Semestinya komunitas internasional sama-sama berjibaku untuk memfasilitasi jalan perdamaian bagi kedua kubu. Namun, sejatinya PBB maupun masyarakat internasional nampak hening dalam konflik ini (Cevik, 2017a).

PBB sebagai instansi tertinggi yang menaungi negara-negara belum mampu membuktikan kekuatannya untuk menyelesaikan konflik tersebut. Disisi lain, banyak negara yang menyalurkan simpati terhadap etnis Rohingya dan kecaman terhadap pemerintah Myanmar. Diantaranya adalah China, Rusia, Inggris dan AS yang menyeru untuk menghentikan kekerasan tersebut. Namun, banyak negara yang hanya memberika *lip service* dalam menanggapi isu tersebut. Disisi lain, inisiatif bantuan

kemanusiaan yang nyata telah ditunjukkan Turki, Malaysia, dan Maroko yang turut meringankan beban Bangladesh, sebagai negara yang menjadi tempat pelarian utama etnis Rohingya yang terusir. Tercatat, sampai 25 Agustus 2017, dimana puncak konflik terjadi, sudah lebih dari 370.000 etnis Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Sementara itu, pemerintah Myanmar telah melarang PBB dan negara-negara anggotanya untuk mengirimkan bantuan kepada etnis Rohingya. Namun, hebatnya TIKO berhasil mengamankan bantuannya ke Provinsi Rakhine tempat etnis tersebut berada. Turki melalui LSM-nya, TIKO, AFAD (Disaster and Emergency Management Presidency), dan Kizilay telah aktif terlibat dalam pengiriman bantuan kemanusiaan sejak 2012 ketika konflik mulai memanas. Pada September 2017, delegasi Turki yang terdiri dari Emine Erdogan, Menlu Mevlut Cavusoglu, dan presiden TIKO Serdar Cam secara langsung mendatangi kamp-kamp pengungsi di Bangladesh guna menyalurkan bantuan kemanusiaan (Cevik, 2017b).

Perlahan, komunitas internasional mulai menunjukkan perhatiannya terhadap konflik ini melalui liputan media yang besar. Namun, selain mengeluarkan pernyataan, PBB semestinya berbenah dalam mengatasi konflik yang bukan hanya terjadi di Myanmar. Krisis kemanusiaan juga melanda banyak wilayah, seperti Suriah, Sudan, Amerika Tengah yang diantaranya terdapat jutaan orang mencari perlindungan ke negara terdekat. Tugas PBB dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan tersebut sayangnya tidak didukung sepenuhnya oleh negara Barat atau negara maju lain, yang cenderung enggan membuka pintu untuk pengungsi ke negaranya. Padahal, sebagai aktor-aktor yang paling berpengaruh di dunia, semestinya perlu untuk berbagi beban dan tanggung jawab. Untuk itu, perlu untuk diadakan saluran dialog antar negara maju

dan penerima pengungsi seperti Turki, Yordania, dan Bangladesh. Karena sumber daya yang dimiliki negara tuan rumah pengungsi juga terbatas. Kontribusi PBB dalam bentuk anggaran pun juga terbilang kecil, yaitu hanya 455 juta USD, sangat jauh dibandingkan dengan Turki yang telah menghabiskan 10 miliar USD untuk pendanaan pengungsi secara global. PBB perlu untuk mendefinisikan ulang peran sentralnya dalam penanganan konflik secara global (Lakha, 2016).

Sementara itu, menurut Senem Cevik, seorang Doktor Studi HI di University of California menyatakan bahwa terdapat dua tantangan utama global yaitu; mereformasi struktur Dewan Keamanan PBB agar lebih sesuai dengan tantangan dan tuntutan krisis di abad 21, dan menyamakan pemahaman diantara bangsa-bangsa dalam melihat konflik dari sudut pandang non-etnis dan non agama. Krisis kemanusiaan yang melanda negara-negara konflik tersebut seharusnya menjadi pelajaran bahwa ini bukan masalah agama, akan tetapi masalah hak asasi manusia. Dan jika negara maju tidak segera bahu-membahu dalam penanganan konflik ini, maka krisis kemanusiaan ini akan selamanya berada di pundak negara berkembang. Ketakutan negara maju terhadap arus pengungsi lebih disebabkan karena ancaman transnasional yang telah terjadi di beberapa kawasan. Terutama bagi pengungsi yang berasal dari negara-negara Timur Tengah. Ancaman yang sering disematkan diantaranya adalah kekhawatiran jika kamp pengungsi nantinya akan dijadikan markas penyerangan yang akan mengganggu keamanan negara (Cevik, 2017c).

Dalam artikel Sayed Rashed Hasan Chowdury, konflik Rohingya disorot dari sudut pandang peran Turki dan Bangladesh yang telah menjadi mitra dalam menampung arus pengungsi Rohingya sejak tahun 1990. Menurut Chowdury, Rohingya bisa dikatakan

sebagai etnis Muslim paling menderita disebabkan disparitas yang luar biasa. Itu semua disebabkan karena pemerintah demokratis Myanmar yang berupaya untuk membangun kembali negara 'Buddhisme'. Etnis Rohingya tidak mau berkompromi untuk mengkonversikan agamanya ke Buddha. Rohingya juga dianugerahi kekayaan alam yang melimpah seperti besi, uranium, batu bara, dan minyak bumi. Itulah yang membuat pemerintah berupaya melakukan tindakan di kota Rakhine, seperti penyiksaan terhadap penduduknya apabila tidak menuruti pemerintah, atau dengan cara radikal seperti aneksasi wilayah. Akibatnya, etnis Rohingya berupaya untuk mencari suaka ke negara lain. Di kota Cox Bazar, Bangladesh lah yang menjadi kamp pengungsian terbesar mereka. Di kamp pengungsian tersebut, banyak organisasi pemerintah maupun non-pemerintah yang telah bekerja, menyalurkan bantuan, mendirikan fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, dan sumber air (Chowdury, 2018a).

Arakan (yang saat ini bernama Rakhine) menjadi tempat yang begitu terisolir dari radar luar negeri. Sangat sedikit organisasi amal yang beroperasi disana. Bahkan, jika pemerintah Myanmar tahu, maka akan langsung dibubarkan. Turki yang memiliki organisasi besar semacam TIKA, berhasil menyalurkan bantuan 1000 ton pada tahun 2017 ke Bangladesh. Bantuan tersebut langsung disalurkan oleh Presiden Erdogan dan rombongan, termasuk istrinya. Bisa dikatakan bahwa Turki termasuk salah satu negara yang sangat prihatin dengan kelangsungan hidup etnis Rohingya. Hal itu dapat dipahami karena Turki ingin menjadi *role model* bagi negara Islam lain untuk bertindak nyata terhadap sesama umat Muslim secara global. Serta menginisiasi komunitas internasional agar turut membantu menyelesaikan konflik kemanusiaan tersebut. Turki telah mengambil langkah-langkah serius dalam menyelesaikan konflik Rohingya.

Beberapa diantaranya adalah membuat deklarasi bersama dengan Kazakhstan yang menghasilkan 19 butir deklarasi yang berisi tentang diskriminasi pemerintah Myanmar yang dilakukan dikategorikan sebagai sumber ketegangan di provinsi Rakhine. Selain itu juga kekerasan tersebut merupakan upaya pemerintahan Myanmar untuk menghapus budaya Islam dan identitas Muslim Arakan (Chowdury, 2018b).

Selain itu, Turki juga berupaya melakukan lalu lintas diplomatik dengan Myanmar secara langsung. Presiden Erdogan bertemu dengan Suu Kyi dan menekankan bahwa peningkatan pelanggaran HAM terhadap Muslim Arakan sudah dalam tahap yang parah atau kompleks sehingga menyebabkan keprihatinan mendalam diseluruh dunia. Erdogan juga menyampaikan sebuah pidato di Majelis Umum PBB, menyerukan agar komunitas internasional tidak boleh membiarkan etnis Rohingya terus-menerus mendapatkan penyiksaan. Bahkan Erdogan secara nyata mengajak PBB untuk menyalurkan dana untuk tempat pengungsian yang akan didirikan di Turki apabila kamp Cox Bazar di Bangladesh sudah mulai penuh. Untuk menangani konflik tersebut tidak bisa mengandalkan dua negara tersebut saja. Negara-negara Muslim perlu bertindak bersama untuk memecahkan masalah ini. Muslim yang tinggal di Arakan selama ribuan tahun harus mendapatkan kembali haknya di tanah tersebut. Dalam hal ini tugas harus diemban oleh semua negara Muslim untuk menciptakan tekanan internasional kepada pemerintah Myanmar. Negara Muslim harus satu suara untuk melindungi Rohingya dan harus menciptakan jaringan yang kuat di PBB untuk memastikan HAM dari orang-orang Rohingya tetap terjaga (Chowdury, 2018c).

Terdapat sebuah prinsip yang dipegang oleh AA dalam menyiarkan liputannya, yaitu *voice of voiceless*. Dalam konteks ini Rohingya bisa dikatakan sebagai kelompok yang tidak berdaya dan memiliki suara. Prinsip yang dipegang AA dan Turki ini diharapkan mampu untuk menginspirasi media dari negara lain untuk menggunakan media arus utama sebagai saluran untuk menghubungkan isu kemanusiaan. Sebab, seperti yang dikutip diatas, banyak negara yang hanya memberikan *lip service* terhadap Rohingya. Dapat dipahami bahwa negara yang tidak mengambil langkah konkret terhadap Rohingya adalah negara yang memiliki populasi Muslim yang minim. Padahal, isu ini dapat ditarik kedalam masalah hak asasi manusia. Liputan diatas juga menggambarkan solidaritas negara-negara mayoritas Muslim seperti Maroko dan Malaysia. Terlepas dari peran negara Barat dalam menyikapi isu tersebut, AA telah melakukan tugas atas instruksi pemerintah Turki dengan baik. Fakta dalam liputan tersebut seharusnya dapat membuat PBB berbenah. Turki pun secara jelas telah mengkalkulasikan bantuannya ke Rohingya dan membandingkannya dengan bantuan dari PBB sebagai institusi yang seharusnya lebih banyak dalam menggalang bantuan. Hal ini dapat mendorong perubahan dalam tubuh PBB agar lebih tanggap dalam menangani suatu konflik.

Sebagai kanal media internasional, AA telah menggambarkan wajah Turki yang baik di ranah global. Seluruh aktor yang terlibat dalam penyaluran bantuan ke kamp Cox Bazar maupun Myanmar disebutkan tanpa satupun dikecualikan. Ini tentunya akan membentuk citra Turki yang baik dimata komunitas internasional. Liputan diatas juga menggambarkan bahwa negara Muslim dapat mempengaruhi institusi besar seperti PBB maupun negara-negara lain. AA yang dapat dikatakan sebagai perwakilan media Muslim

ingin mencitrakan Turki sebagai negara yang berkomitmen dalam menjaga perdamaian dunia. Salah satu hal yang menjadi kekuatan AA dalam menyusun redaksinya adalah menyediakan perspektif dari orang Turki. Didalam liputan tersebut, terdapat Dr. Senem B. Cevik, seorang doktor di bidang studi HI Universitas California, yang mengutip beberapa poin penting terkait restrukturisasi PBB, pandangan terkait isu kemanusiaan dan peran negara maju dan negara berkembang yang timpang. Hal ini penting untuk diulas mengingat Turki yang secara langsung berhadapan dengan kenyataan bahwa komunitas internasional banyak yang masih belum membuka diri untuk memberi bantuan ke Myanmar. Liputan tersebut sekaligus menjadi kritik kepada komunitas internasional dari sudut pandang orang Turki melihat permasalahan besar yang telah disebutkan dalam tiga poin diatas. Dalam kasus ini, AA telah menjalankan sebuah teori *Media Diplomacy: Basic Communication Variant*, dengan menyediakan *platform* bagi orang Turki untuk menyampaikan kegelisahan terhadap institusi maupun negara terkait konflik Myanmar. Bagi Turki, teoribosan AA dapat menjadi acuan pembaca untuk mengetahui kebijakan apa yang diambil oleh Turki dalam permasalahan tersebut. Di kanal media lain, banyak berita terkait konflik Rohingya ini. Hanya saja, Turki tidak bisa mengandalkannya karena Turki memiliki agenda untuk menyebarluaskan narasinya tentang bantuan apa saja yang telah dikerahkan, dan siapa aktor dari yang berkontribusi dalam penyaluran bantuan tersebut. Penulis tidak melihat media lain menyediakan informasi selengkap redaksi AA. Oleh karenanya, dalam kasus ini AA sangat bisa diandalkan untuk menyebarluaskan narasi Turki.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini telah berhasil menemukan sebuah temuan berupa strategi Anadolu Agency dalam mengglobalkan narasi Turki. Melalui pendekatan wawancara, penulis berhasil memetakan strategi AA melalui tiga fokus utama yaitu; *Pertama*, menggunakan fokus Turki sebagai ujung tombak dalam pemberitaannya. *Kedua*, menyorot isu terkait Islam sebagai identitas media Turki, yang mana merupakan negara mayoritas Muslim. AA diharapkan mampu menjadi perantara untuk menyalurkan aspirasi dari kaum Muslim. *Ketiga*, fokus terkait isu-isu kemanusiaan. Dalam hal ini, AA mempunyai prinsip *voice of voiceless*, yaitu menjadi penyalur aspirasi bagi pihak-pihak yang tidak diperhitungkan oleh kebanyakan komunitas internasional. Tiga fokus tersebut merupakan agenda utama dari pemerintah Turki. Melihat gejolak politik internasional yang begitu dinamis, peran AA sebagai mitra Turki menjadi tidak terbantahkan lagi.

Penulis juga menemukan beberapa studi kasus yang relevan dengan tiga fokus diatas. Misalnya dalam isu Turki, kerjasama Turki dengan Somalia, Balkan, maupun Uni Eropa yang mempunyai dimensi yang berbeda-beda, diliput oleh AA dengan mengedepankan narasumber yang berkaitan erat dengan isu tersebut, baik dari sudut pandang orang Turki, maupun analis yang mewakili argumen mitra Turki. Kemudian, dalam isu Islam, terdapat rivalitas media Barat dengan negara Islam seperti Turki, isu Amerika Serikat yang sedikit menarik diri dalam fokus ke kawasan Timur Tengah, dan isu sentimen anti-Islam di Austria. Tiga isu tersebut digambarkan oleh AA dengan

positioning dan respon dunia Islam secara langsung, tanpa melupakan ciri khas dari pemberitaannya, yaitu mengutip argument ulama-ulama kawasan maupun cendekiawan Muslim sebagai sumber utama pemberitaan. Sedangkan isu kemanusiaan, menjadi isu terakhir yang menjadi fokus utama AA. Dalam studi kasus sebelumnya, terdapat misi Turki menyelesaikan pembunuhan Jamal Khashoggi, dan juga solidaritas Turki-Bangladesh terhadap pengungsi Rohingya. Dua studi kasus tersebut menyorot secara utuh agenda-agenda pemerintahan Turki terhadap isu kemanusiaan terkait. Hal itu mengindikasikan bahwa Turki ingin menjaga komitmen untuk perdamaian dunia.

Peran AA dalam hal ini menjadi sangat strategis untuk eksistensi Turki dalam politik internasional. Fenomena media yang disponsori pemerintah menjadi isu yang menarik untuk diperbincangkan di zaman kemajuan teknologi informasi seperti saat ini. Disatu sisi AA dapat menjalankan hakikatnya sebagai *outlet media* dan kerjasamanya dengan Turki dapat mempermudah segala operasional media karena secara langsung didanai pemerintah. AA seolah sedang menikmati eksistensinya di kancah media global. Di sisi lain, Turki tentunya mendapat keuntungan yang masif karena narasi-narasi pemerintahannya menjadi sangat mudah dibaca oleh komunitas internasional. Di zaman ini, penting bagi Turki untuk mempunyai medianya sendiri, untuk memperkuat legitimasinya baik dikawasan Timur Tengah, maupun secara global. Penulis juga telah membuka wawasan bahwa disiplin ilmu Hubungan Internasional bukan hanya berkaitan dengan *government to government*, akan tetapi peran media juga harus diperhitungkan sebagai *non-state actor*.

Melalui teori *Media Diplomacy: The Basic Communication Variant*, penulis telah memberikan analisis bahwa delapan isu diatas yang meliputi isu Turki, Islam, dan kemanusiaan hanya mampu untuk diberitakan oleh AA sebagai mitra utama Turki dalam tujuan menyebarluaskan narasinya. Turki tidak akan bisa mengandalkan media arus utama lain, terlebih dari luar negeri untuk memastikan narasinya dibaca dengan baik oleh komunitas internasional, karena kecenderungan media saat ini yang banyak memiliki campur tangan pemerintah. Dengan adanya AA, Turki mampu untuk mengirimkan sinyal kepada global terkait kebijakan luar negerinya. Disamping itu, Turki juga dapat menetapkan kebijakan luar negerinya berdasarkan sinyal yang dikirim balik oleh negara yang bersangkutan dengan kebijakan Turki. Dari kerjasama Turki-AA, dapat disimpulkan secara sederhana bahwa ini merupakan kerjasama yang saling menguntungkan.

B. Saran

Dalam penelitian ini penulis memaparkan bahwa tiga poin utama diatas merupakan strategi AA dalam menyebarluaskan narasi AA diranah global. Poin-poin tersebut sejatinya belum pernah diteliti oleh siapapun. Maka dalam hal ini penulis menyarankan agar peneliti-peneliti selanjutnya dapat memperdalam temuan terkait strategi-strategi lain yang digunakan oleh AA secara kompleks dari sudut pandang disiplin ilmu media atau komunikasi. Karena sejatinya penulis dalam hal ini hanya menyorot peran AA dari sudut pandang politik pemerintahan yang sangat relevan dengan disiplin ilmu Hubungan Internasional. Keterbatasan penulis dalam mendalami ilmu komunikasi dapat dilengkapi oleh penelitian selanjutnya yang lebih komprehensif.

Sehingga bagi pembaca akan mengetahui secara menyeluruh perjalanan AA dari media lokal menjadi media internasional.

References

Anadolu Agency. (n.d.). Retrieved from <https://www.aa.com.tr/en>:

<https://www.aa.com.tr/en/p/history>

Artz, L. (2006). TeleSUR, Venevision, and the Bolivarian Revolution: Culture and Class in Media Democracy. *Research Gate*, 225-229.

Azran, T. S. (2013). Al-Jazeera, Qatar, and New Tactics in State-Sponsored Media Diplomacy. *Research Gate*, 1294-1309.

Azzam, A. (2020). *PM Yunani: Kami siap berdialog dengan Turki soal Mediterania*. Athena: Anadolu Agency.

Azzam, M. A. (2020). *OPINI – Mengapa Presiden Prancis Macron menyerang Turki?* Istanbul: Anadolu Agency.

Azzam, M. A. (2020). *Prancis berpihak pada Armenia dalam konflik dengan Azerbaijan*. Paris: Anadolu Agency.

Azzam, M. A. (2020). *Turki: Yunani berbohong soal inisiatif NATO untuk masalah Mediterania Timur*. Jakarta: Anadolu Agency.

Gilboa, E. (2007). *Diplomacy in the media age: Three models of uses and effects*. Routledge: Taylor & Francis Group, 10-15.

Guldagi, M. (2020). *OPINI – Mengapa Presiden Prancis Macron menyerang Turki?* Istanbul:

Anadolu Agency.

Ikhsan, Y. Q. (2019). Hambatan Akses Turki ke Uni Eropa. *Journal of International Relations*,

589.

Irak, D. (2016). *Turkish Studies*, 3-5.

Irak, D. (2018). A Close-Knit Bunch: Political Concentration in Turkey's Anadolu Agency through

Twitter Interactions. *Turkish Studies*, 1-2.

Latief, M. N. (2020). *ANALISIS: Islamofobia semakin menguat di Eropa*. Jakarta: Anadolu

Agency.

Press, A. (2020). *Sengketa Migas dengan Turki, Yunani Perkuat Militer*. Jakarta: CNN Indonesia.

Rufinaldo, R. C. (2019). *PM Pakistan puji Erdogan angkat isu Kashmir di PBB*. Jakarta: Anadolu

Agency.

The Organizational Behavior of RT. (2020, September). Retrieved from politico.eu:

<https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2020/09/RT.pdf>.

Yoedtadi, M. G. (2018). MEDIA MASSA DALAM DIPLOMASI INTERNASIONAL KEBIJAKAN

REDAKSI SURAT KABAR BERBAHASA INGGRIS JP DALAM MEMBERITAKAN HUBUNGAN

INDONESIA SINGAPURA. *Research Gate*, 404-409.

Yulistyowati, E. P. (2016). PENERAPAN KONSEP TRIAS POLITICA. *Jurnal Dinamika Sosial dan*

Budaya, 328.

Chalaby, J. K. (2003). *Television for a New Global Order: Transnational Networks and the Formation Global System*. Gazette.

Edward S. Herman, R. W. (2004). *The Global Media – the New Missionaries of Corporate Capitalism*. London: Continuum.

Gozali, P. (2021, January 31). Interview Jurnalis AA Indonesia. (M. S. Alfarisi, Interviewer)

Hachten, W. A. (1993). *International News System*.

Holsti, K. (1983). *International Politics: A Frame Work for Analysis*. New Jersey: Prentice-Hall.

Irak, D. (2016). A Close-Knit Bunch: Political Concentration in Turkey's Anadolu Agency melalui Twitter Interactions . *Tukish Studies*, 1.

Matos, C. (2012). Mass Media and Globalization. *ReseachGate*, 2.

Mugdha, S. C. (2007). "Global Mediation: on the Changing Ecology of Satellite Television News. In *Global Media and Communication* (pp. 51-78).

Shinar, D. (2002). *Media Diplomacy and 'Peace Talk': The Middle Eastand the Northern Ireland*. Gazzete.

Thompson, J. (1995). *The Media and Modernity: a social theory of the media*. Cambridge: Polity Press.

Abdulle, O. (2019). Turkey's Opening Up Foreign Policy in Somalia. *The Journal of Academic Social Science*, 456-472.

Bayrakli, E. (2016). Orientalism Reloaded: How Western Media Covered the Coup Attempt in Turkey Covered the Coup Attempt in Turkey. *SETA*, 1-6.

Brljavac, B. (2013). Turkish in the Balkans: Capitalising on a Soft Power. *Research Gate*, 6-20.

Bruksel. (2015). *EU eyes Turkey after AK Party regains majority*. Brussels: Anadolu Agency.

Cevik, D. S. (2017). *The plight of the Rohingya: A massive wake-up call*. California: Anadolu Agency.

Chowdury, S. R. (2018). Humanity and Security: Internal and External Dynamics behind the Muslim Rohingya Refugee Crisis, The role of Turkey and Bangladesh. *Journal of Balkan and Near Eastern Studies*.

EU. (2015, October 6). *Draft Action Plan: Stepping up EU-Turkey cooperation on support of refugees and migration management in view of the situation in Syria and Iraq*.

Retrieved from European Union Website:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_15_5777

Gauvin, G. (2016). TRUMP'S FOREIGN POLICY FOR THE MIDDLE EAST: AN ACE OR A DEUCE? *Canadian Forces College*, 1-8.

Gozali, P. (2021, January 29). Interview Pemimpin Redaksi Anadolu Agency Indonesia. (M. S. Alfarisi, Interviewer)

Hafez, D. F. (2019). *Paradigm shift in Austria's security politics vis-à-vis Islam*. Salzburg: Anadolu Agency.

Hafez, F. (2019). OFFICIAL ISLAM AS A THREAT? THE PARADIGM SHIFT IN AUSTRIA'S SECURITY POLITICS. *SETA*, 1-6.

Hussain, A. (2017). *The Middle East without America*. Washington: Anadolu Agency.

Lakha, A. (2016). *Time for action at UN and global level*. London: Anadolu Agency.

McConnell, A. (2016). *Ethical void at the heart of Western press coverage of Turkey*. Istanbul: Anadolu Agency.

Muhasilovic, S. C. (2016). *Turkey's Balkan policy not interest-oriented*. Ankara: Anadolu Agency.

Nia, O. T. (2021). *Austrian Muslims to sue government over controversial 'Islam map'*. Berlin: Anadolu Agency.

Obsiye, L. (2019). *Turkey's growing soft power at display in Somalia*. Mogadishu: Anadolu Agency.

Onum, N. K. (2019). *Turkey pledges to illuminate Khashoggi murder: Erdogan*. Istanbul: Anadolu Agency.

Rufinaldo, R. C. (2019). *PBB: Pembunuhan Khashoggi dilakukan oleh pejabat Saudi*. Ankara: Anadolu Agency.

Telci, I. N. (2018). The Murder of Jamal Khashoggi and the Future if Middle East Politics. *SETA*, 11-16.